



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 40 Volume 10 Desember 2014



Wakil Menteri ESDM Buka Pameran Kelistrikan Indonesia 2014

Sesditjen Ajak Mahasiswa UGM Ubah Paradigma Terhadap Energi

Jawa Barat Targetkan RE 99% di tahun 2018

PLTA 500 MW Segera Dibangun di Nunukan

Tariff Adjustment Diberlakukan 1 Januari 2015



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Tahun 2014 sebentar lagi berlalu. Tahun ini meninggalkan kesan begitu dalam dalam kehidupan berbangsa kita sebab tahun ini kita semua mengikuti pesta demokrasi yang akhirnya memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengangkat Sudirman Said menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Beberapa terobosan dalam bidang ketenagalistrikan kita tunggu bersama untuk mewujudkan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kesejahteraan rakyat.

Seminggu setelah dilantik, Menteri ESDM Sudirman Said menggelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II pada lingkungan Kementerian ESDM, bertempat di Auditorium Samaun Samadikun, Ditjen Ketenagalistrikan (4/11). Setelah itu, Menteri ESDM memimpin rapat koordinasi kelistrikan nasional untuk menyelesaikan berbagai persoalan mengenai ketenagalistrikan di Indonesia.

Gerak cepat Menteri ESDM ini menginspirasi seluruh elemen dalam Kementerian ESDM khususnya sektor ketenagalistrikan. Pembangunan kelistrikan yang berkesinambungan dan memperhatikan lingkungan tetap menjadi fokus pemerintah dalam melayani masyarakat.

Beberapa kegiatan sektor ketenagalistrikan di penghujung tahun 2014 dapat didokumentasikan oleh tim Buletin Ketenagalistrikan. pada edisi 40 Volume X ini, anda dapat membaca beberapa kegiatan mengenai peringatan hari pertambangan dan energi serta hari listrik nasional yang memasuki tahun ke-69. Baca juga artikel menarik kiriman pembaca mengenai Implementasi CSR dalam perusahaan energi serta beberapa artikel menarik khas Buletin Ketenagalistrikan.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2015, semoga selalu sukses.

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Totoh Abdul Fatah, Heru Setiawan, Hinsu Silaen, Ear Marison, Hagni Surendro, Felix Rudianto, Slamet Riyadi, Sudarti, Wiwid Mulyadi, Jackson Frans, Fathorrahman, Hari Dwi Wijayanto, Pandu Satria Jati, David F Silalahi, Ilham Budi, Elif Doka Marliska, Andi Winarno, Eri Nurcahyanto, Novan Akhriyanto, Dina Andriani, Hening Surya Bayu A.

Penyunting/ Editor

Ernawati, Suwarno, Matilda Parameswari, Stefanus Wisnu W

Desain Grafis/Fotografer

Achmad Yusuf Haryono Agus Supriyadi, Ajat Munajat, Novi Pravitasari, Adar

Sekretariat

Emi Tursilah, Irman Suryana, Efrika Maritho, Rizka Octiwi, Riono Saputra



DAFTAR ISI

Berita

- Wakil Menteri ESDM Buka Pameran Kelistrikan Indonesia 2014
- Wakil Menteri ESDM Pimpin Upacara Peringatan HPE ke-69
- Pembangunan Ketenagalistrikan Wajib Perhatikan Lingkungan
- Sesditjen Ajak Mahasiswa UGM Ubah Paradigma Terhadap Energi
- Pemerintah Optimis Pembangkit EBT Menggantikan Fosil
- Masyarakat Ketenagalistrikan Peringati Hari Listrik Nasional ke-69
- Jawa Barat Targetkan RE 99% di tahun 2018
- Menteri ESDM Tegaskan Perlunya Penyederhanaan Perizinan
- Batubara Ramah Lingkungan Prioritas Pembangkit Listrik
- Menteri ESDM Pimpin Rapat Bahas Kondisi Listrik
- Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Memperoleh Penghargaan HTCA 2014
- Bada Usaha Penunjang dan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Wajib Bersertifikat
- PLTA 500 MW Segera Dibangun di Nunukan
- Dirjen Ketenagalistrikan Temui BENS Delegation Team
- Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Diharapkan Siap Hadapi MEA 2015
- DJK Kembali Selenggarakan Forum PUIL di Surabaya
- Tariff Adjustment Diberlakukan 1 Januari 2015
- Pokok-Pokok Pengatur dalam Permen ESDM nomor 33 tahun 2014
- Pembangunan Jaringan Transmisi di Cilacap harus Tepat Waktu

ARTIKEL

- Implementasi CSR Sebagai Modal Perencanaan Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Pengembang Energi Terbarukan
- FGD Ketahanan Energi di Kawasan ASEAN - Prospek Pengembangan Energi Nuklir di Indonesia
- Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik 2015
- Humas Pemerintah Dituntut Kreatif
- Tinjauan Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA K/L

Alamat Redaksi

Sekretariat Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.07-08,
Kuningan, Jakarta 12950
Telepon/Fax (021) 5225180
Email : buletin@djlpesdm.go.id



Wakil Menteri ESDM Buka Pameran Kelistrikan Indonesia 2014

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B



Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo didampingi Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Arief Indarto meninjau stan pameran di Pameran Kelistrikan Indonesia 2014

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo didampingi Direktur Jenderal ketenagalistrikan, Ketua Masyarakat ketenagalistrikan Indonesia Harry Jaya Pahlawan, Direktur Operasi Jawa-Bali-Sumatera Pt PLN Ngurah Adnyana, dan Ketua Panitia hari Listrik Nasional (HLN) ke-69 Sri Andini membuka Pameran Kelistrikan Indonesia yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Rabu (2/10).

Dalam sambutannya Wamen ESDM mengharuskan pertemuan dalam seminar-seminar dan pameran di sektor kelistrikan ini dapat membawa perubahan banyak dalam sektor ketenagalistrikan. Menurutnya dengan kebutuhan tambahan pembangkit listrik antara 5.000-6.000 MW per tahun, peran swasta dalam penyediaan

tenaga listrik menjadi sangat vital. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ketenagalistrikan merupakan keharusan agar listrik Indonesia tetap menyala. "Hari ini merupakan hajatan perkawinan antara pemerintah, MKI, PLN, dan para investor," ungkapnya.

Pameran yang mengusung tema "Percepat Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional" ini adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh



Pemerintah dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menghadiri pembukaan Pameran Kelistrikan Indonesia di JCC (2/10)



Pengunjung pameran melihat-lihat stan Ditjen Ketenagalistrikan dalam Pameran Kelistrikan Indonesia 2014.



Konferensi Pers oleh Wamen ESDM setelah upacara pembukaan pameran.



Dalam Pameran Kelistrikan ini diluncurkan simulasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Online.

Listrik Indonesia. Sebelumnya pameran ini juga sukses dihelat di Jakarta (2010), Palembang (2011), Batam (2012), dan Surabaya (2013). Pameran Kelistrikan 2014 ini dilaksanakan tanggal 1 – 3 Oktober 2014 dan diikuti oleh 100 perusahaan energi dan kelistrikan lokal maupun internasional.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM juga berpartisipasi dalam pameran ini dengan menghadirkan booth yang memberikan

informasi seputar investasi ketenagalistrikan. Dalam booth tersebut pengunjung pameran dapat melakukan konsultasi mekanisme perizinan usaha penyediaan maupun usaha penunjang ketenagalistrikan. Dalam pameran tersebut Ditjen Ketenagalistrikan juga mensimulasikan perizinan Sertifikat Laik Operasi (SLO) secara online yang dapat diakses melalui website www.djk.esdm.go.id.

Wakil Menteri ESDM Pimpin Upacara Peringatan HPE ke-69

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menjadi Pembina Upacara pada Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi (HPE) ke-69 yang dilaksanakan di Halaman Gedung Kementerian ESDM, Kamis (2/10). Dalam sambutannya, Wamen ESDM berharap agar perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu di Sektor ESDM dapat ditiru oleh para pegawai yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral. “Hal yang bisa kita tiru adalah semangat berkorban dari para pejuang,” ujarnya.

Tema peringatan Hari jadi Pertambangan dan Energi ke-69 ini adalah “Dengan Semangat Hari Jadi Pertambangan dan Energi, Kita Wujudkan Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat”. Menurut Susilo, hal tersebut jangan hanya dijadikan tema saja, tapi juga ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang harus ditanamkan menurut Wamen adalah Catur Dharma Energi seperti meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, mengurangi impor bahan bakar minyak, mengembangkan energi baru terbarukan, serta membudayakan hemat energi.

Wamen ESDM menginstruksikan 5 hal yang menjadi keteladanan para pahlawan. Yang pertama adalah menempatkan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua adalah meneladan semangat pengorbanan untuk negara, ESDM, dan institusi. Ketiga menurutnya



Wamen ESDM Susilo Siswoutomo memberikan penghargaan Dharma Karya Energi (atas), pembacaan sejarah hari pertambangan dan energi (tengah), pemberian potongan tumpeng dari Wamen ESDM kepada ketua panitia, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (bawah).



Balon terbang menghiasai langit Jakarta pada peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-69 (kiri), marching band dari STEM AKA Migas Cebu memeriahkan peringatan HPE ke-69 (tengah), Menteri ESDM dan interm Chairul Tanjung mengunjungi pameran pertambangan dan energi (kanan).

adalah melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Keempat adalah menjadi pemimpin yang amanah. Sedangkan yang terakhir adalah menjunjung tinggi kerjasama, baik antar unit di sektor ESDM maupun kerjasama dengan institusi lain. “Kerjasama harus sinkron dan terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Direktur Jenderal ketenagalistrikan Jarman selaku ketua panitia peringatan HPE ke-69, Peserta Upacara Peringatan HPE ke-69 ini terdiri dari para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM, anggota DEN,

pejabat BPH Migas, dan SKK Migas, Direksi BUMN dan stakeholder sektor ESDM, para mantan pejabat Eselon I Kementerian ESDM, Perwakilan Staf Unit Eselon I Kementerian ESDM, serta Dharma Wanita Kementerian ESDM. “Selain upacara, peringatan HPE ke-69 juga dimeriahkan dengan Pameran yang diikuti oleh unit-unit Kementerian ESDM dan BUMN sektor ESDM,” ujar Jarman.

Dalam upacara peringatan HPE ke-69 juga diberikan Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral kepada 35

penerima penghargaan dari unit Kementerian ESDM dan BUMN sektor ESDM atas jasanya dalam mengembangkan sektor energi dan sumber daya mineral. Selain itu Penghargaan K3 Sektor Minerba juga akan diberikan kepada 5 perusahaan yang memberikan perhatian khusus kepada Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sub sektor Mineral dan batubara. “Selamat kepada para penerima penghargaan, semoga bisa ditiru oleh yang lain,” ujar Wamen ESDM



Wamen ESDM meninjau stan Ditjen Ketenagalistrikan dalam pameran yang digelar untuk memeriahkan HPE ke-69.



Pembangunan Ketenagalistrikan Wajib Perhatikan Lingkungan

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B



Para pembicara menyampaikan materi dalam Forum Komunikasi Lingkungan Ketenagalistrikan yang dihelat di Hotel Mercure Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/10)

Pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono saat membuka Forum Komunikasi Lingkungan Ketenagalistrikan yang dihelat di Hotel Mercure Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/10).

Dalam kesempatan tersebut Agoes menjelaskan peran sektor ketenagalistrikan dalam

pembangunan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi, menurutnya pemerintah terus membangun instalasi penyediaan tenaga listrik, baik dari pembangkit, transmisi

dan distribusi. “Diantaranya melalui Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik atau Fast Track Program Tahap I yang menggunakan batubara maupun tahap II yang memprioritaskan pembangkit panas bumi dan



Kasubdit Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik Hanat Hamidi menyampaikan presentasi dalam Forum Komunikasi Lingkungan Ketenagalistrikan.



energi baru terbarukan,” ujar Agoes. Ia juga menambahkan bahwa penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu indikator utama terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat.

Program Penilaian Peningkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sebagai pelaksanaan evaluasi pengelolaan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Kementerian ESDM di sektor ketenagalistrikan untuk mewujudkan penyediaan tenaga

listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan. Agoes menyadari bahwa dalam pengelolaan lingkungan di lapangan, tidak semua personil siteplan memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan lingkungan yang baik serta kemungkinan adanya pemahaman yang berbeda di lapangan antara pelaksana dan pengawas (KLH dan BPLHD).

Menurut Agoes forum komunikasi lingkungan ketenagalistrikan ini menjadi kesempatan sebagai forum penyampaian informasi

terkait pengelolaan lingkungan serta memfasilitasi pemerintah selaku regulator dan pengawas dengan pelaku usaha sektor ketenagalistrikan selaku penanggung jawab pengelolaan lingkungan. Ia juga berharap forum ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk mewujudkan keselarasan dalam pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan.



Forum komunikasi lingkungan ketenagalistrikan ini menjadi kesempatan sebagai forum penyampaian informasi terkait pengelolaan lingkungan serta memfasilitasi pemerintah selaku regulator dan pengawas dengan pelaku usaha sektor ketenagalistrikan selaku penanggung jawab pengelolaan lingkungan



Salah satu peserta Forum Komunikasi Lingkungan Ketenagalistrikan menyampaikan pertanyaan dalam sesi tanya jawab.



Sesditjen Ajak Mahasiswa UGM Ubah Paradigma Terhadap Energi

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Mahasiswa merupakan insan cendekia yang berperan dalam pengembangan sektor energi di Indonesia. Untuk itu, pemahaman akan ketahanan dan kemandirian energi harus dimiliki oleh mahasiswa. Pameran dan diskusi Jogja Energy Forum yang mengangkat tema 'Indonesia After Oil' diharapkan memberikan manfaat bagi ketahanan dan kemandirian energi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat jenderal Ketenagalistrikan Ir Arief Indarto MM dalam Seminar dan Diskusi yang diselenggarakan oleh panitia Jogja Energy Forum di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (11/10). Acara yang berlangsung Sabtu-Minggu ini diselenggarakan oleh Komunitas Mahasiswa Sentra Energi (KAMASE) sebagai bentuk perhatian pada pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.



Menurut Arief, ketahanan energi adalah kemampuan untuk merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) serta kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar (internal). Sedangkan yang dimaksud dengan kemandirian energi adalah kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi (security of energy supply), kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi (infrastructure availability), serta kemampuan untuk menjangkau harga (keekonomian) energi (willingness to pay). "Ke depan, diperlukan perubahan paradigma dalam pengembangan energi," ujar Arief. Menurutnya



Atas : Sesditjen Ketenagalistrikan Arief Indarto menjadi pembicara dalam Forum 'Indonesia After Oil'

Tengah : Panitia Jogja Energy Forum menyampaikan kenang-kenangan kepada Sesditjen Ketenagalistrikan usai diskusi nasional.

Bawah : Mahasiswa UGM Yogyakarta memadati stan Ditjen Ketenagalistrikan dalam pameran Jogja Energy Forum 2014

beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu mengefisienkan kebutuhan energi, memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil

energy cost, bila perlu disubsidi, energi fosil dipakai sebagai penyeimbang, sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai warisan untuk anak-cucu / diekspor.

Dalam kesempatan tersebut Arief juga memaparkan capaian dan rencana program ketenagalistrikan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap II (Fast Track Program Phase II) memberikan porsi yang lebih kepada sumber energi non BBM. Dari 17.918 MW yang direncanakan masuk ke dalam sistem pembangkit listrik, sebanyak 4.965 MW atau 28% dari Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) dan 1.803 (10%) dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sesuai Peraturan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2014, PT PLN wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik panas bumi. Harga pembelian tenaga listrik dipergunakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement) dari pembangkit listrik tenaga panas bumi tanpa negosiasi dan bersifat final. PT PLN dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan harga melebihi harga tersebut dengan melakukan negosiasi dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.

Pameran yang diselenggarakan oleh Jogja Energy Forum dimeriahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menyampaikan program-program dan sarana mendekatkan diri kepada mahasiswa. Acara berlangsung meriah dan mahasiswa UGM mendapatkan banyak manfaat dari pelaksanaan Jogja Energy Forum ini.

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B



Diskusi Jogja Energy Forum dihadiri ratusan mahasiswa (atas). Sesditjen Ketenagalistrikan mengunjungi stan Ditjen Ketenagalistrikan (tengah). Foto bersama peserta forum diskusi nasional (bawah).

Pemerintah Optimis Pembangkit EBT Menggantikan Fosil



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan sambutan dalam Launching Permen ESDM no 27 tahun 2014 di Hotel Borobudur Jakarta (22/10).

Pembangunan pembangkit dari Energi Baru Terbarukan (EBT) selain ramah lingkungan juga sustain dalam hal ketahanan energi. Pemerintah optimis pembangunan pembangkit listrik dari EBT dapat pelan-pelan menggantikan pembangkit berbahan bakar fosil. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam Launching Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (22/10). Menurutnya, untuk meningkatkan kapasitas listrik seiring pertumbuhan ekonomi, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan seperti biomassa dan biogas menjadi keharusan mengingat pembangkit listrik dari energi fosil kurang ramah lingkungan dan ketersediaan pasokannya juga terbatas. "Saya berharap secara bertahap pembangkit energi fosil bisa digantikan dengan energi baru terbarukan," ujar Jarman.

Peraturan Menteri yang dilanuching oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana ini mengatur tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Peraturan Menteri (Permen) tersebut merupakan revisi dari Permen sebelumnya yaitu Permen No. 4 Tahun 2012, sebagai bentuk insentif untuk mendorong minat investor dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas. Dirjen Ketenagalistrikan bersyukur bahwa dalam peraturan baru ini selain menetapkan harga yang kompetitif bagi investor juga telah diakomodir tambahan bagipembangkit yang bisa mengikuti beban. Menurutnya, untuk daerah di luar Jawa yang tidak ada alternatif energi lain, pembangunan pembangkit dari biomassa dan biogas yang bisa

mengikuti beban sangat penting sekali.

Pemerintah bertekad rasio elektrifikasi bisa tercapai 99% di tahun 2020. Jarman optimis target tersebut dicapai karena pada waktu ia pertama kali menjadi Dirjen pada tahun 2011, Rasio Elektrifikasi baru mencapai 67% dan meningkat menjadi 82% di tahun 2014 ini. "Jika kecepatannya dijaga, rasio elektrifikasi 99% di tahun 2020 saya yakin bisa tercapai," ungkapnya. Salah satu problem adalah menyiapkan pembangkit-pembangkit di daerah remote. Untuk itu, pembangkit dari Biomass dan Biogas adalah salah satu terobosan untuk mengatasi kekurangan listrik di daerah tersebut. Jarman berharap bahwa Permen ESDM nomor 27 tahun 2014 ini merupakan langkah awal komitmen pemerintah untuk mendorong energi baru terbarukan dan meningkatkan



rasio elektrifikasi. Kebijakan ini merupakan sinergi yang terus dilakukan selain kebijakan-kebijakan lain dalam sektor ketenagalistrikan.

Dirjen EBTKE Rida Mulyana berharap peraturan ini mampu meningkatkan kapasitas listrik khususnya dalam meningkatkan investasi di daerah-daerah. Ia mengaku sering mendapat keluhan dari calon-calon investor bahwa mereka urung menginvestasikan uangnya di daerah-daerah karena kurangnya pasokan listrik. Untuk itu ia terus berupaya memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas listrik dari energi baru terbarukan. Melalui Permen ESDM nomor 27 tahun 2014 ini ia berharap pembangunan biomassa dan biogas dapat dibangun secara massif dan sporadis. Setelah ini ia akan mengkaji kebijakan lain seputar EBT seperti air, angin, samudera hingga tenaga surya agar semua potensi alam dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. "Kita bisa memanfaatkan semua potensi yang kita punya," ujarnya optimis.

Peraturan Menteri ESDM ini pada prinsipnya mendorong pemanfaatan potensi biomassa dan biogas untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil khususnya bahan bakar minyak (BBM) pada daerah-daerah yang memiliki ketergantungan terhadap BBM dan wilayah kepulauan yang masih memiliki rasio elektrifikasi rendah. Peraturan Menteri ini selain mengatur kewajiban pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit listrik Biomassa dan Biogas juga menetapkan harga jual listrik (Feed-in-Tariff) untuk tenaga listrik berbasis biomassa dan biogas. Beberapa hal lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut adalah prosedur dan persyaratan penetapan pengelola



Dirjen EBTKE Rida Mulyana membuka launching PermenESDM no 27 Tahun 2014 (atas). Salah satu peserta menyampaikan pertanyaan dalam sesi tanya jawab (bawah).

energi biomassa dan energi biogas untuk pembangkit listrik serta kewajiban PLN untuk menyusun model Perjanjian Jual Beli Listrik standar. Upaya Kementerian ESDM ini merupakan upaya meningkatkan nilai manfaat biomassa dan biogas sebagai penghasil energi yang sangat potensial sehingga di tahun 2025 diharapkan Indonesia dapat menggunakan EBT sebesar 23% dalam suplai energi nasional.

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B



Masyarakat Ketenagalistrikan Peringati Hari Listrik Nasional ke-69

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Senin (27/10) merupakan puncak peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-69. Pelaksanaan puncak HLN ke-69 tersebut diperingati dengan upacara yang diikuti oleh segenap Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menjadi pembina upacara yang dilaksanakan di plaza kantor Pusat PT PLN (Persero) tersebut. Hadir dalam upacara tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Direksi PT PLN serta para ketua asosiasi dan gabungan pengusaha biang ketenagalistrikan. Peserta upacara sendiri dari unit-unit PT PLN, perwakilan pegawai Ditjen Ketenagalistrikan dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia.

Dalam amanat upacara, Dirjen Ketenagalistrikan berpesan bahwa Tanggal 27 Oktober merupakan tonggak sejarah bagi insan ketenagalistrikan, dimana seiring dengan perjuangan merebut kemerdekaan, dilakukan pembentukan Jawatan Listrik dan Gas yang merupakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik milik Belanda di Indonesia. Nasionalisasi tersebut diraih melalui perjuangan para pekerja perusahaan listrik dan kalangan pemuda untuk merebut perusahaan listrik dari tangan penjajah Jepang. "Perjuangan tersebut merupakan rangkaian perjuangan bangsa Indonesia setelah berhasil merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945," ujar Dirjen.

Menurut Jarman, Pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari Listrik Nasional ke-69 (atas). Pemotongan tumpeng oleh Dirjen Ketenagalistrikan se usai upacara (bawah).

sektor ini, yaitu dengan mendorong usaha penyediaan tenaga listrik agar lebih mandiri, dan senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik, yang saat ini rata-rata tumbuh sebesar 8,4% pertahun.

Tingkat pertumbuhan permintaan tenaga listrik tersebut, memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk pengembangan dan perluasan infrastruktur penyediaan tenaga listrik (pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga



Upacara peringatan Hari Listrik Nasional ke-69 dihadiri karyawan PT PLN dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (atas). PPenandatanganan MOU antara PT PLN dan KPK (tengah). Dr. Faisal Basri menyampaikan paaparan mengenai outlook ekonomi Indonesia (bawah).

listrik). Menurut Jarman, rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai sekitar 82%. Walaupun rasio elektrifikasi tersebut naik cukup signifikan dibanding tahun 2010 yang hanya 67,15%, namun artinya masih terdapat masyarakat

yang hingga saat ini belum menikmati tenaga listrik akibat belum tercukupinya infrastruktur penyediaan tenaga listrik di daerah tersebut.

Pembangunan infrastruktur

penyediaan tenaga listrik tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah dan PT. PLN (Persero) saja, namun diperlukan partisipasi seluruh pelaku usaha mengingat ketersediaan dana Pemerintah amat sangat terbatas. Selain itu, menurut Jarman, untuk mencukupi kebutuhan listrik nasional, pemerintah dan PLN senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan gerakan penghematan penggunaan tenaga listrik. Upaya tersebut diantaranya melalui kampanye memanfaatkan tenaga listrik sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta menggunakan peralatan dan pemanfaat listrik yang hemat energi.

Tema HLN tahun ini adalah 'Bersama Memajukan Kelistrikan Indonesia'. Dalam Gerak Jalan Sehat yang dimeriahkan oleh keluarga besar MKI, PLN, dan Ditjen Ketenagalistrikan, Minggu (26/10), Jarman menyambut baik pelaksanaan HLN yang diperingati oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan. "Mari kita bersama-sama berusaha untuk membangun sektor ketenagalistrikan agar lebih baik di masa mendatang," ujarnya.

Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan coffee morning yang dihadiri oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Dalam acara tersebut, hadir Dr Faisal Basri yang menyampaikan outlook ekonomi Indonesia yang dapat memberikan inspirasi bagi para pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan. Dalam acara tersebut ditandatangani MOU antara PLN dan KPK mengenai komitmen anti gratisifikasi serta evaluasi pelaksanaan monitoring program PMO yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero).

Jawa Barat Targetkan RE 99 % di tahun 2018

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Barat sampai Akhir Tahun 2013 lalu baru mencapai 82,15%. Pemerintah Provinsi menargetkan mampu meraih 99 % pada tahun 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara Penganangan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Barat yang dipusatkan di lapangan Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, Kamis (30/10).

Aher, panggilan akrab Gubernur Jabar, sangat mengapresiasi atas kepedulian Pemkab purwakarta dalam menyelesaikan pemenuhan listrik bagi warga purwakarta. Bahkan saat ini rasio elektrifikasi kabupaten ini telah mencapai 99%. "Purwakarta dan Karawang merupakan daerah yang kami anggap mampu menjalankan program listrik dengan sangat baik. Bahkan, Purwakarta saat ini hampir



Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (tengah) menandatangani peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat.

99 persen rumah warga telah teraliri listrik. Kami sangat apresiasi itu," ujar Heryawan.

Heryawan mengaku, tata pemerintahan yang bagus dapat dilihat dari meratanya

pembangunan infrastur sampai pelosok desa, terpenuhinya listrik untuk seluruh masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakatnya yang cukup bagus. Mulai tahun depan pihaknya akan mengajak pemerintah pusat dan kabupaten/



Kabupaten Purwakarta sebagai tuan rumah penganangan RE Provinsi Jawa Barat telah mencapai 99% di akhir tahun 2014 ini.



Gubernur Ahmad Heryawan menyampaikan sambutan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan mampu meraih 99 % pada tahun 2018.

kota di Jabar untuk berkomitmen untuk sama-sama memprioritaskan anggaran untuk alokasi listrik ini.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman yang ikut serta dalam Pencanangan Peningkatan Rasio Elektrifikasi tersebut juga ikut mengapresiasi kinerja provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Purwakarta. “Persentase rumah tangga di Jabar yang telah berlistrik sudah sangat bagus dan hampir mendekati pemakai listrik di Jakarta yang telah mencapai 99 persen,” tuturnya.

Saat ini terdapat dua program andalan Kementerian ESDM terkait listrik bagi masyarakat. Pertama, program listrik pedesaan, seperti membangun jaringan termasuk pemasangan travo. Kedua adalah pemasangan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tak mampu. “Untuk program kedua ini, tak



Pemberian bantuan listrik gratis secara simbolis kepada masyarakat tidak mampu di Provinsi Jawa Barat.

hanya berlaku di desa. Tapi juga berlaku bagi masyarakat di perkotaan,” ungkapnya.

Tahun ini, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran untuk membantu 62 ribu rumah tangga tak mampu. Pemerintah pusat

sangat mengapresiasi jika ada ada komitmen kuat dari provinsi dan kabupaten/kota dalam mengutamakan alokasi anggaran untuk listrik. “Kami optimis, Pemprov Jabar yang menargetkan bisa 99 persen rumah tangga sudah berlistrik pada 2018, itu bisa teralisasi,” ungkapnya.

Menteri ESDM Tegaskan Perlunya Penyederhanaan Perijinan

PENULIS : ANGGITA MIFTAH HAIRANI

Menteri ESDM Sudirman Said menggelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II pada lingkungan Kementerian ESDM, bertempat di Auditorium Samaun Samadikun, Ditjen Ketenagalistrikan (4/11). Dalam konferensi pers yang diadakan sebelum rapat pimpinan, Menteri menegaskan bahwa dirinya ingin mendengar paparan peta kelistrikan Indonesia secara keseluruhan.

“Nanti juga saya akan undang Dirut PLN sebagai eksekutor di lapangan. Supaya masyarakat tahu bagaimana sesungguhnya keadaan listrik kita.”

Menteri ingin mengetahui bagaimana situasi kelistrikan yang sesungguhnya. Menurutnya, semua pihak concern kepada listrik karena pertumbuhan ekonomi terhambat karena ketiadaan listrik; pembangunan pemukiman juga susah kalau tidak ada listrik.

“Saya ingin menekankan pada jajaran saya di Ditjen Ketenagalistrikan untuk membuka apa adanya, termasuk masalah-masalah yang paling berat sekalipun karena hanya kalau kita sampai dasar persoalan, kita bisa mencari solusi,” ujar Menteri.

Menteri juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo tentang arahan pembangunan ke depan. Hal ini menyangkut hal-hal yang sangat mendasar, termasuk bagaimana listrik harus diselesaikan, soal bagaimana perijinan-perijinan dipercepat, bagaimana migas dan sumber daya alam mesti dikelola dengan baik, juga penekanan perlunya



Menteri ESDM Sudirman Said langsung bekerja dengan menggelar rapat kerja di kantor Ditjen Ketenagalistrikan seminggu setelah pelantikan (atas). Suasana Rapat kerja yang diikuti pejabat Eselon I dan II di Kementerian ESDM (bawah).

membangun nilai tambah dan kapasitas nasional dan pengendalian ekspor bahan mentah yang tanpa melalui processing terlebih dulu.

Terkait dengan proses perijinan yang sebelumnya rumit, Menteri menekankan supaya hal tersebut bisa dibuat lebih sederhana.

“Idenya adalah yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Itu ide dasarnya. Penyederhanaan hanya bisa dilakukan jika kita tidak punya kepentingan apa-apa sehingga semua program semata-mata hanya diadakan untuk kepentingan rakyat. Jika kita tengok kiri-kanan, mulailah kerumitan yang tidak perlu. Lakukan penyederhanaan.”



Dari kiri ke kanan : Sekjen KESDM Teguh Pamuji, Menteri ESDM Sudirman Said, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri juga menyampaikan adanya penyegaran di Kementerian ESDM. Menteri telah menandatangani Surat Keputusan pengangkatan pelaksana tugas dirjen migas, yakni Naryanto Wagimin menggantikan Edy Hermantoro.

“Berdasarkan laporan UKP4, dari seluruh program nasional yang dikejar, banyak hal terhambat di situ. Hal itu berdampak pada industri,” ungkap Menteri saat ditanya alasan dilakukannya penyegaran di ESDM. Lebih lanjut, Menteri mengungkapkan jika penyegaran ini merupakan upaya untuk mengurai sumbatan supaya hal-hal yang tertunda bisa diselesaikan.

Selain itu, Menteri juga menyatakan telah mengajukan lima nama calon kepala SKK Migas

kepada komite pengawas untuk di-review. Menurut Menteri, calon dari internal maupun eksternal sama-sama memiliki kelebihan.

“Calon eksternal memiliki persepektif segar dan tidak ada

beban psikologis, sementara calon internal memiliki kekuatan memahami betul situasi internal. Kita ajukan dua-duanya supaya Bapak Presiden yang memutuskan karena beliau memiliki kewenangan.”



Menteri ESDM menggelar konferensi pers untuk menjelaskan rapat kerja yang digelar di kantor Ditjen Ketenagalistrikan (4/11).

Batubara Ramah Lingkungan Prioritas Pembangkit Listrik



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan keynote address di Regional Government Conference (RGC) dalam rangkaian Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2014 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (5/11).

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Penggunaan energi batubara masih menjadi prioritas pembangkit listrik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc pada saat menyampaikan keynote address di Regional Government Conference (RGC) dalam rangkaian Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2014 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (5/11).



Menurut Dirjen Ketenagalistrikan, pemerintah terus membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang berwawasan lingkungan.

Untuk mengejar tambahan 35.000 MW dalam 5 tahun, diperlukan pembangkit listrik yang berkapasitas besar. Menurut Jarman solusi yang terbaik saat ini adalah membangun pembangkit

listrik berbahan bakar batubara. "Pilihan utama pembangkit listrik masa depan adalah batubara," ungkapnya. Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan menteri-menteri energi se-ASEAN di

Laos yang lalu, Indonesia telah mendeklarasikan prioritas energinya pada batubara dan pembangkit listrik dari bahan bakar gas dibangun untuk daerah-daerah remote. Menurutnya,



Suasana diskusi dalam Kegiatan IIICE 2014. Kegiatan ini merupakan diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Perkonomian

pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan seperti air, angin, biomassa dan panas bumi tetap akan digalakkan untuk menjaga ketahanan energi.

Dirjen Ketenagalistrikan menambahkan, meskipun akan mengejar pembangunan pembangkit listrik dari batubara, namun akan tetap menggunakan teknologi yang berwawasan lingkungan. Teknologi batubara ramah lingkungan seperti Ultra Super Critical dan Super Critical digalakkan untuk mewujudkan pembangkit listrik yang bersih dan baik untuk lingkungan. “Selain meningkatkan efisiensi, teknologi ramah lingkungan juga bisa mengurangi emisi,” ujarnya.

Dalam paparannya, Jarman menyampaikan kondisi kelistrikan di Indonesia seperti rasio elektrifikasi yang saat ini telah mencapai 82% dan menargetkan 99% di tahun 2020. Konsumsi listrik Indonesia saat ini mencapai 860 kwh/kapita dan ditargetkan menjadi 1.300 kwh/kapita di akhir tahun 2018. Ia juga memaparkan

kebijakan harga listrik dengan mengurangi subsidi serta rencana regulasi mengenai Power Wheeling untuk meningkatkan investasi di sektor ketenagalistrikan.

Kegiatan IIICE 2014 sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan bersama antar Kementerian Koordinator Perkonomian. Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut dimeriahkan juga dengan pameran pembangunan

dan infrastruktur yang diikuti oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta. Kementerian ESDM juga berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan menampilkan beberapa capaian kinerja dan proyek-proyek sektor ESDM yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat seperti program listrik perdesaaan dan program listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan.



Dirjen Ketenagalistrikan mendapatkan kenang-kenangan dari panitia Regional Government Conference (RGC) usai menyampaikan keynote address.

Menteri ESDM Pimpin Rapat Bahas Kondisi Listrik

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memimpin rapat koordinasi mengenai kondisi kelistrikan Indonesia bersama jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero). Rapat yang dilaksanakan Sabtu (8/11) tersebut membahas beberapa agenda di bidang kelistrikan yang harus segera diselesaikan. Rapat ini sebagai kelanjutan dari rapat kelistrikan yang dilaksanakan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Selasa sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM mendengarkan paparan dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengenai permasalahan kelistrikan dan penyebabnya, perkembangan konstruksi pembangkit listrik, serta pengembangan kelistrikan ke depan khususnya untuk melistriki daerah-daerah remote dan pengembangan energi terbarukan. Hadir pula memberi masukan Sekjen KESDM Teguh Pamudji, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, serta jajaran Eselon II Ditjen Ketenagalistrikan. Perwakilan dari UKP4 juga hadir memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus segera dilakukan.

Dalam rapat tersebut Menteri ESDM memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah menyikapi kondisi kelistrikan sesuai pemaparan PT PLN. Ia memotivasi para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM untuk tetap optimis bekerja melayani masyarakat. Sudirman Said mengajak semua pihak



Menteri ESDM Sudirman Said bersama para pejabat dari Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) duduk bersama Sabtu (8/11) menyelesaikan persoalan-persoalan di sektor kelistrikan.

untuk mengurai persoalan demi persoalan seperti mengurai persoalan pembangkit listrik swasta (IPP), koordinasi dengan Kementerian dan pemerintah daerah terkait, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi yang ada. Ia meyakinkan bahwa persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan komunikasi yang intensif.

Menurut Menteri hasil dari rapat ini akan dilaporkan kepada Wakil Presiden dan dibahas dalam sidang kabinet mendatang sehingga persoalan-persoalan kelistrikan dapat segera diselesaikan. Ia meminta semua pihak untuk menyingkirkan konflik kepentingan dan terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat.



Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Memperoleh Penghargaan HTCA 2014



prestisius yang diberikan untuk dua kategori yaitu Komite Teknis dan Sekretariat Komite Teknis Perumusan SNI yang memiliki kinerja terbaik. Penentuannya didasarkan pada kriteria yaitu Komite Teknis dan kesekretariatan yang dapat merumuskan SNI yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dinilai telah menerapkan tahapan proses perumusan standar sesuai dengan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang diacu, serta mampu menyelesaikan program kerjanya sesuai target yang telah ditetapkan. Penghargaan Herudi Technical Committee Award yang pertama kali diberikan pada Tahun 2008, diambil dari nama Herudi Kartowisastro seorang penggagas standardisasi di Indonesia yang telah banyak memberikan pemikiran kearah perkembangan SNI melalui pembinaan Komite Teknis.



Pemberian penghargaan Nomine Herudi Technical Committee Award 2014 dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk kategori Sekretariat Komite Teknis kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM memperoleh penghargaan Nomine Herudi Technical Committee Award 2014 dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk kategori Sekretariat Komite Teknis, setelah terpilih menjadi salah satu dari tiga Sekretariat Komite Teknis terbaik Tahun 2014. Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi dan kinerja

pengelolaan kesekretariatan Komite Teknis 29-09 Mesin Listrik. Pemberian penghargaan tersebut berlangsung pada acara pembukaan Indonesia Quality Expo (IQE) 2014 pada tanggal 12 November 2014 di Jakarta Convention Center yang di buka oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir.

Herudi Technical Committee Award adalah suatu bentuk penghargaan

Penghargaan Nomine Herudi Technical Committee Award 2014 diserahkan oleh Kepala BSN Bambang Prasetya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan yang diwakili oleh Kepala Seksi Perumusan Standard Ketenagalistrikan dan disaksikan oleh Menristek dan Dikti. Dalam kesempatan yang sama penghargaan juga diberikan kepada tiga Komite Teknis terbaik serta kepada Pemerintah Provinsi / Pemerintah Daerah yang dinilai memberikan perhatian dan kontribusi besar dalam pengembangan standar nasional.

PENULIS : SAHAT SIMANGUNSONG



Badan Usaha Penunjang dan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Wajib Bersertifikat

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agus Triboesono memaparkan pokok-pokok Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Selain itu tenaga teknik yang bekerja di sektor ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). Sertifikat tersebut merupakan bukti pengakuan atas kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi yang dimiliki, sehingga akan terwujud usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mampu memberikan pelayanan yang profesional. Hal tersebut mengemuka dalam Coffee Morning 'Launching Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik' yang diselenggarakan di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/11). Peraturan Menteri ini melengkapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perizinan Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman berpesan bahwa dalam dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada tahun 2015 nanti, para pelaku usaha ketenagalistrikan di Indonesia harus dapat bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain dalam kawasan ASEAN. Untuk itu ia menyampaikan bahwa SBU dan SKTT akan disetarakan di negara ASEAN melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA). Menurut Jarman, untuk mempercepat terwujudnya pelaku usaha ketenagalistrikan yang profesional, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mendorong institusi pendidikan dan pelatihan seperti Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Kerja untuk dapat melakukan sertifikasi terhadap peserta didik. "Diharapkan pada saat kelulusan, peserta didik selain memiliki ijazah

kelulusan dapat juga memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT)," ungkap Jarman.

Coffee Morning yang dihadiri para pelaku usaha penyedia dan penunjang ketenagalistrikan, pemerintah daerah, universitas, balai latihan kerja, dan asosiasi-asosiasi sektor ketenagalistrikan ini menghadirkan tiga pembicara. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Herliza memaparkan peluang dan tantangan ASEAN Economic Community 2015. Menurut Herliza, beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan antara lain harus menguasai bahasa asing baik bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan sertifikasi bertaraf ASEAN dan Internasional, Memahami MRA dan ASEAN MNP Agreement beserta komitmennya dari semua negara anggota ASEAN, serta mematuhi peraturan domestik di negara-negara ASEAN.

Untuk mengantisipasi MEA 2015, pemerintah melalui Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM juga telah membenahi sistem pelayanan perizinan secara online. "Hari ini kita juga akan mengeluarkan soft launching online registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO)," ungkap Jarman. Menurutnya dengan cara ini pelayanan registrasi SLO dari Ditjen Ketenagalistrikan dapat dilaksanakan dengan cepat, cukup satu hari kerja jika semua syarat-syarat lengkap. Kasubdit



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman memberikan sambutan dalam Coffee Morning Launching Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014, Kamis (13/11).

Listrik (IUJPTL) diterbitkan oleh Menteri ESDM atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Peraturan ini mengatur penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2012, sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik meliputi seluruh bidang usaha jasa penunjang seperti konsultasi, pembangunan & pemasangan, pemeriksaan & pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, litbang, diklat, lab, penguji, asesor ketenagalistrikan, serta usaha lain yang terkait langsung dengan bidang usaha penunjang.

Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Ferry Triansyah memaparkan sistem database online register SLO yang dapat dibuka melalui website slo.djk.esdm.go.id.

Sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memaparkan pokok-pokok pengaturan dari Permen ESDM nomor 28 tahun 2014. Ia memaparkan bahwa Usaha Jasa Penunjang Tenaga



Atas :

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfnitra (kanan) tengah berbincang dengan para stakeholder dalam Coffee Morning Launching Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014, Kamis (13/11).

Kiri:

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Herliza memaparkan peluang dan tantangan ASEAN Economic Community 2015.

PLTA 500 MW Segera Dibangun di Nunukan

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 500 MW akan segera dibangun di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. PLTA ini memanfaatkan aliran sungai Sembakung yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Nunukan dengan debit air di daerah muara sungai 1.000 m³/s dan memiliki potensi listrik tenaga air 500 MW. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman Msc berharap semoga pembangunan PLTA ini dapat berjalan tepat waktu dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik untuk smelter dan excess power-nya dapat dijual ke PT PLN (Persero) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab. Nunukan. Hal tersebut disampaikan Jarman saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Nunukan Basri dan Direktur Utama PT Hanergy Power Indonesia, Xiang Zhigang, Jumat (14/11) di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan yang mendesak. Menurut Jarman, pembangunan dan pengembangan berbagai pembangkit listrik guna menambah kapasitas terpasang sangat penting untuk dilakukan. "Sampai saat ini infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia terus membaik," ungkap Jarman. Hal tersebut ditunjukkan dengan terus meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik dari 31.959 MW di tahun 2009 dan saat ini menjadi 51.981 MW, yang



Dirjen Ketenagalistrikan (tengah) menyaksikan Penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Nunukan Basri dan Direktur Utama PT Hanergy Power Indonesia, Xiang Zhigang untuk membangun PLTA 500 MW.

terdiri dari 71 % dimiliki oleh PT PLN (Persero), 20% pembangkit IPP, 4% PPU dan sisanya sebesar 5% merupakan pembangkit Non-BBM untuk kepentingan sendiri.

Menurut Jarman, PLTA merupakan salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Kementerian ESDM terus mendorong semua pihak untuk membangun dan mengembangkan PLTA yang memanfaatkan potensi air di daerah setempat. pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah dan PT. PLN (Persero) saja. Partisipasi seluruh pelaku usaha sangat diharapkan mengingat ketersediaan dana Pemerintah dan PT PLN (Persero) sangat terbatas. Untuk itu pemerintah terus berupaya mengajak pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan serta akan mempermudah perizinan di sektor ketenagalistrikan.

Jarman mengungkapkan, pembangunan dan pengembangan PLTA yang menggunakan potensi sumber daya air yang berlimpah di Sungai Sembakung, Kabupaten Nunukan ini dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain dalam pengembangan penyediaan tenaga listrik. "Dengan debit air di daerah muara sungai 1.000 m³/s dan memiliki potensi listrik tenaga air 500 MW, kawasan ini sangat berpotensi untuk pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan energi terbarukan," ujarnya.

Selain Dirjen ketenagalistrikan, penandatanganan Mou antara Bupati Nunukan dan Direktur Utama PT Hanergy Power Indonesia, juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Jika sesuai rencana, pembangunan PLTA ini akan selesai di tahun 2022.

Dirjen Ketenagalistrikan Temui BENS Delegation Team

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc pada hari Kamis (20/11) menerima kunjungan dari tim delegasi Business Executive for National Securities (BENS) di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kuningan Jakarta. Organisasi non partisan dan non profit yang bergerak dalam membantu persoalan keamanan ini ingin mengetahui bagaimana kondisi ketahanan energi, khususnya energi listrik di Indonesia. Delegasi tersebut datang bersama perwakilan militer pemerintah Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan didampingi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra dan Kepala Sub Direktorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik Afrizal.

Dalam pertemuan tersebut Jarman memaparkan kondisi ketahanan energi di Indonesia, khususnya penyediaan energi listrik. Dirjen memaparkan bahwa penyediaan listrik di Indonesia masih didominasi batubara, namun sejalan dengan itu pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan juga digalakkan. Jarman juga memaparkan bahwa pemerintah Indonesia akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW dengan bahan bakar batubara, namun memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan seperti teknologi super critical. Dirjen menekankan bahwa karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka pembangunan kelistrikan di pulau-pulau kecil dan daerah remote menggunakan tenaga matahari. Mengenai pembangunan kelistrikan di kawasan-kawasan



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menerima kunjungan dari Business Executive for National Securities (BENS), Kamis (20/11).

Industri, Jarman menerangkan bahwa pemerintah Indonesia tengah menyusun kebijakan power wheeling untuk mencukupi kebutuhan listrik di kawasan Industri.

Sebelas Delegasi BENS juga menanyakan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) karena Indonesia memiliki potensi panas bumi yang cukup besar. Pertanyaan tersebut dijawab Dirjen Ketenagalistrikan dengan menjelaskan progres-progres PLTP yang salah satunya terdapat dalam Program Percepatan Pembangkit Listrik Tahap II. Dirjen juga menjelaskan beberapa kerjasama yang selama ini tengah dibangun dengan perusahaan-perusahaan luar negeri dalam membangun pembangkit listrik dan infrastrukturnya. Delegasi BENS menyampaikan terima kasih atas penerimaan Dirjen

Ketenagalistrikan. Mereka bersama militer Amerika Serikat siap memberikan bantuan dalam mengamankan ketahanan energi di Indonesia. Dirjen Ketenagalistrikan juga berterima kasih atas kunjungan tim BENS dan berharap kunjungan ini dapat meningkatkan kerjasama dalam pembangunan ketenagalistrikan Indonesia dan negara-negara sahabat

Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Diharapkan Siap Hadapi MEA 2015

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, para pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan diharapkan bersiap diri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kerjasama yang selama ini terjalin. Selain itu, rencana pemerintah membangun kurang lebih 35.000 MW untuk menerangi Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku bisnis ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono saat mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan membuka Rapat Kerja Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Listrik Indonesia (AKLI) 2014, yang diselenggarakan di Solo, Selasa (18/11). Agoes berharap para anggota AKLI memanfaatkan Rakernas ini untuk berkoordinasi dan berkompromi agar bisnis kelistrikan di Indonesia tidak kalah dari negara-negara lain di ASEAN saat MEA diberlakukan 1 Januari 2016 mendatang.

Agoes menyampaikan bahwa pemerintah melalui Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM telah dan tengah menyediakan regulasi yang akan melindungi pelaku usaha dalam negeri. Pemerintah juga memfasilitasi komunikasi antara para pelaku usaha dan penyedia tenaga listrik dalam hal ini PT PLN (Persero). Peraturan untuk menggunakan tenaga dalam negeri dan syarat kompetensi berbahasa Indonesia bagi para tenaga kerja kelistrikan di Indonesia merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar pelaku usaha kelistrikan



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono mengunjungi stan pameran dalam Rapat Kerja Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Listrik Indonesia (AKLI) 2014.

Indonesia dapat menjadi prioritas bagi pelaksanaan pembangunan kelistrikan di masa depan. Namun Agoes mengingatkan bahwa hal tersebut kembali pada komitmen para pelaku usaha. "Saya yakin anggota AKLI mampu berkompetisi dan saling bekerja sama sehingga pelaksanaan pembangunan kelistrikan dapat berjalan tepat waktu," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Agoes berpesan agar para kontraktor di sektor ketenagalistrikan memahami dan melaksanakan peraturan yang ada. Salah satu peraturan baru yang harus dipahami para pelaku usaha adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana beberapa perizinan



Pemotongan pita menandai pembukaan pameran dalam Raker AKLI 2014 yang diselenggarakan di Kota Solo Jawa Tengah.



Pemukulan gong oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono. Agoes berharap para anggota AKLI memanfaatkan Rakernas ini untuk berkoordinasi dan berkompromi agar bisnis kelistrikan di Indonesia tidak kalah dari negara-negara lain di ASEAN saat MEA diberlakukan 1 Januari 2016 mendatang.

ketenagalistrikan yang semula ada di pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan ke pemerintah Provinsi. “Para kontraktor listrik harus tau dan menaati peraturan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Operasi Jawa Bali-Suatera PT PLN (Persero), Ngurah Adnyana menantang para kontraktor listrik untuk dengan cepat dan tepat menyediakan peralatan yang dibutuhkan PLN baik dalam pembangkitan, jaringan transmisi, distribusi, hingga pemanfaatan tenaga listrik. PLN berjanji akan mempermudah prosedur pengadaan bagi para kontraktor. Menurutnya tuntutan pemerintah membangun 35.000 MW merupakan tantangan besar yang harus segera dijawab oleh para pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan. Ngurah berharap Rakernas ini membawa hasil yang baik bagi kerjasama yang selama ini dibangun AKLI dan PLN.

Acara Rakernas AKLI sendiri dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, dan dihadiri oleh sekitar 370 anggota dan pengurus AKLI di seluruh Indonesia. Selain rapat kerja, acara juga dimeriahkan oleh pameran kelistrikan yang diikuti para pelaku

usaha di sektor ketenagalistrikan. Dalam pembukaan Rakernas, hadir pula perwakilan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Acara pembukaan Rakernas ditutup dengan penampilan Paduan Suara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan tarian tradisional Jawa Tengah.



Para pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan diharapkan bersiap diri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kerjasama yang selama ini terjalin

DJK Kembali Selenggarakan Forum PUIL di Surabaya



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agus Triboesono membuka Forum Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) di Surabaya, Rabu (26/11).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kembali menggelar Bimbingan Teknis melalui Forum Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) di Surabaya, Rabu (26/11). Kegiatan ini sejalan dengan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi pengamanan instalasi tenaga listrik. Hadir membuka acara, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agus Triboesono didampingi Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu.

Menurut Agus acara forum ini selalu diadakan berkala agar bisa dipahami oleh pribadi atau orang per orang, dan pelaku usaha tentang apa saja persyaratan-persyaratan dalam rangka pengoperasian menghidupkan instalasi tenaga listrik khususnya yang bertegangan tinggi hingga 1000 Volt. "Dalam pengoperasian tegangan tenaga listrik harus

mengikuti aturan-aturan yang berlaku, harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu agar aman dan andal di operasikannya," tutur Agus. Dalam kesempatan itu juga Agus meminta peran aktif baik masyarakat atau individu dan para pelaku usaha untuk terus terlibat dalam penyusunan PUIL. Karena di akui Agus PUIL 2011 ini sudah beberapa kali dilakukan

penyempurnaan akan tetapi masih butuh masukan dari semua pihak untuk menyempurnakannya lagi.

Agus juga menyampaikan bahwa Listrik merupakan hal yang menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk mendapatkan listrik masyarakat tidak serta merta langsung di kantor begitu saja, tapi harus ada aturan-aturan yang harus diikuti atau prosedur-prosedur sehingga mendapatkan listrik yang aman di gunakannya pada instalasinya masing-masing.

PUIL 2011 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi saat akan memasang instalasi listrik voltase rendah (230 V), baik untuk perumahan, komersial maupun industri. PUIL 2011 merupakan revisi PUIL 2000 (tahun disahkan menjadi Standar Nasional Indonesia – SNI) beserta Amandemen 1 tahun 2006, dengan nomor standarnya adalah: SNI 0225-2011. Maksud dan tujuan pemberlakuan PUIL



Dalam sambutannya, Agus menyatakan bahwa kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi pengamanan instalasi tenaga listrik



2000 sebagai standar wajib adalah agar pengusaha instalasi listrik terselenggara dengan baik, untuk menjamin keselamatan manusia dari bahaya kejut listrik, keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya, keamanan gedung serta isinya dari kebakaran akibat listrik, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, pemberlakuan SNI PUIL 2000 perlu diawasi sehingga konsumen memperoleh jaminan keamanan atas instalasi listrik yang digunakan. Sebelum dioperasikan instalasi tersebut harus diperiksa, diuji dan lulus laik operasi. Laik operasi instalasi juga tidak lepas dari pemenuhan standar yang digunakan.

Forum PUIL 2011 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan wadah bagi pelaku usaha dan industri, peneliti, pakar, serta konsumen dalam menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya untuk penyempurnaan PUIL yang disepakati oleh semua pihak secara konsensus. Tugas di bidang standardisasi tidak pernah selesai, penyusunan PUIL perlu mempertimbangkan aspek persyaratan teknis dan



Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan presentasi terkait PUIL 2011.

kemampuan industri nasional serta daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi dan kerjasama yang telah terbina dengan baik dalam masyarakat standardisasi ketenagalistrikan dapat terus ditingkatkan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menghimbau pada semua stakeholders baik produsen, konsumen, pakar, peneliti, dan perguruan tinggi untuk terus memberi sumbangsinya di dalam pengembangan PUIL selanjutnya.



Pemerintah menghimbau semua stakeholders baik produsen, konsumen, pakar, peneliti, dan perguruan tinggi untuk terus memberi sumbangsinya di dalam pengembangan PUIL selanjutnya.

PENULIS : PANDU SATRIA JATI B



Tariff Adjustment Diberlakukan Mulai Januari 2015

PENULIS : ANGGITA MIFTAH HAIRANI

Awal tahun 2015, tariff adjustment akan diterapkan kepada 12 golongan pelanggan tarif non-subsidi. Demikian salah satu pokok bahasan dalam sambutan Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman, pada acara Coffe Morning yang digelar di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta (4/12). Ketentuan mengenai tariff adjustment ini tertuang dalam Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Tariff adjustment mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2015 dan dilaksanakan setiap bulannya dengan mengacu pada tiga faktor, yakni nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi.

Dua belas golongan pelanggan tariff non-subsidi tersebut adalah (1) Rumah Tangga R-1/TR daya 1.300 VA, (2) Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200VA, (3) Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500VA s.d 5.500VA, (4) Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600VA keatas, (5) Bisnis B-2/TR, daya 6.600VA s.d 200kVA, (6) Bisnis B-3/TM daya diatas 200kVA, (7) Industri I-3/TM daya diatas 200kVA, (8) Industri I-4/TT daya diatas 30.000kVA, (9) Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600VA s.d 200kVA, (10) Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200kVA, (11) Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan (12) Layanan khusus TR/TM/TT. Dirjen menegaskan bahwa pemerintah masih memberikan subsidi bagi rumah tangga dengan daya 450VA dan 900VA, juga bagi yang termasuk dalam tarif sosial, bisnis kecil, dan industri kecil.



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra menyampaikan presentasi mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Benny Marbun, dalam paparannya menyebutkan tariff adjustment 2015 dapat menghemat subsidi hingga Rp8,492 triliun. Benny menjelaskan dari total 37 Golongan Tarif, 12 di antaranya sudah mencapai tariff adjustment pada 2015. Ini juga berarti ada 19% pelanggan dari 61 juta pelanggan yang membayar listrik dengan tarif tersebut. Pelanggan yang sudah membayar listrik dengan tariff adjustment mengkonsumsi 66% listrik dari total penjualan 18 TWh/bulan. Lebih lanjut, Benny menyampaikan bahwa pelanggan yang sudah membayar listrik dengan tariff adjustment akan memberikan 81% revenue bagi PLN dari total revenue Rp19,7 triliun per bulan. Dengan demikian, Benny mengharapkan PLN dapat terus meningkatkan kualitasnya, terlebih karena pelanggan telah membayar sesuai harga keekonomiannya.

Selain pembahasan mengenai tariff adjustment, dalam acara Coffee

Morning juga disosialisasikan Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014 oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra. Permen ini mengenai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Di samping itu, ada juga Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Rizal Edi Halim, yang memaparkan Economy Outlook 2015.

Acara Coffee Morning merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan cara pandang di antara pemangku kepentingan, juga implementasinya di lapangan.



Pokok-Pokok Pengaturan dalam Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014

PENULIS : ANGGITA MIFTAH HAIRANI



Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan pada hari Kamis (4/12). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Niaga PT PLN Benny Marbun (kiri) dan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Rizal Edi Halim (kanan).



Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 17 November 2014. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Satya Zulfanitra, menyampaikan pokok-pokok Permen tersebut dalam acara Coffee Morning yang diselenggarakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan di Jakarta (4/12).

Satya Zulfanitra menjelaskan bahwa dalam Permen tersebut ada tiga hal yang diubah, yakni terkait Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), biaya penyambungan, dan Jaminan Langgan Tenaga Listrik. Permen ini sekaligus mencabut Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Lebih lanjut, Satya Zulfanitra menyatakan bahwa PLN wajib mengumumkan TMP dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat-tempat

yang mudah diketahui konsumen. Ini untuk mempermudah konsumen dalam mengetahui apa yang menjadi haknya jika PLN tidak bisa memenuhi mutu pelayanan sesuai deklarasi. TMP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PLN.

Ada 13 indikator dalam TMP, namun lima indikator akan menjadi parameter untuk menentukan penalti. Kelima indikator tersebut adalah lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan KWH meter, dan waktu koreksi kesalahan rekening. Satya Zulfanitra menjelaskan bahwa jika realisasi kelima indikator tersebut lebih dari 10% dari deklarasi yang telah ditetapkan, maka konsumen berhak mendapat pengurangan tagihan sebesar 20% dari biaya beban atau rekening minimum. Nilai ini lebih besar dari peraturan sebelumnya yang mensyaratkan pengurangan tagihan sebesar 10%.

Dalam hal penyambungan listrik baru atau perubahan daya, Satya Zulfanitra menyampaikan

bahwa konsumen dapat memilih sambungan listrik berdasarkan Tarif Tenaga Listrik Reguler atau Tarif Tenaga Listrik Prabayar.

“Konsumen yang menginginkan tingkat mutu tenaga listrik, keandalan, dan ataupun estetika tertentu atau adanya ketentuan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan jaringan khusus, maka penambahan biaya tersebut menjadi beban konsumen dengan tetap dikenakan Biaya Penyambungan,” Satya Zulfanitra menegaskan. Ia memberikan contoh Pemprov DKI Jakarta yang menginginkan kabel listrik bawah tanah sehingga ada penambahan biayanya.

Terkait Jaminan Langgan Tenaga Listrik, Satya Zulfanitra mengungkapkan bahwa jaminan tidak hanya berupa uang, namun sekarang juga bisa berupa bank garansi. Bank garansi hanya diberlakukan untuk konsumen tegangan menengah dan tegangan tinggi. Sementara itu, jaminan bagi konsumen tegangan rendah masih berupa uang.

Jaminan Langgan Tenaga Listrik diperuntukkan bagi konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik Reguler. Jaminan ini ditetapkan senilai biaya rekening rata-rata satu bulan sesuai golongan tarif yang dibayarkan paling lambat satu bulan setelah penyambungan baru atau perubahan daya. Jika konsumen berpindah ke Tarif Tenaga Listrik Prabayar, maka Jaminan Langgan Tenaga Listrik dikembalikan kepada konsumen setelah diperhitungkan dengan tagihan listrik dan semua hutang kepada PLN yang belum dilunasi.



Pembangunan Jaringan Transmisi di Cilacap Harus Tepat Waktu

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mengingatkan PT PLN (Persero) untuk dapat menyelesaikan pembangunan jaringan transmisi di Cilacap tepat waktu. Hal ini sangat penting mengingat pembangunan pembangkit-pembangkit baru di Cilacap, Jawa Tengah akan segera selesai dan masuk ke sistem kelistrikan Jawa-Bali-Sumatera. Hal tersebut disampaikan Jarman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PLTU 2 Jateng Adipala (600 MW), Jumat (5/12). “Masuknya transmisi sesuai jadwal akan sangat menentukan masuknya kapasitas PLTU Cilacap sesuai jadwal juga,” ungkapnya. Dalam sidak tersebut, Dirjen didampingi oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono.

Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan mengunjungi PLTU Swasta (IPP) yang dikelola oleh PT. Sumber Segara Primadaya (S2P). Dalam kunjungan ke PLTU S2P, Jarman meninjau dua unit pembangkit masing-masing berkapasitas 300 MW dan proyek pembangunan unit ekspansi berkapasitas 660 MW. Dalam penjelasan jajaran direksi PLTU IPP S2P, pelaksanaan pembangunan proyek ekspansi telah berjalan dan direncanakan dapat masuk sistem kelistrikan tahun 2016. Melihat pembangunan proyek yang berjalan lebih cepat dari rencana dan tanpa hambatan berarti, Jarman optimis pembangunan pembangkit ekspansi unit 3 ini dapat dipercepat sehingga 2015 dapat masuk ke sistem. Syaratnya, pembangunan jaringan transmisi PLN harus selesai tepat waktu.



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman didampingi Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan melakukan inspeksi mendadak ke PLTU 2 Jateng (Adipala) dan PLTU Swasta (IPP) yang dikelola oleh PT. Sumber Segara Primadaya (S2P).

Proyek PLTU Adipala merupakan salah satu proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik milik PT PLN yang masuk dalam program percepatan pembangunan (fast track) pembangkit listrik 10.000 MW tahap I. PLTU yang terletak di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah ini diperkirakan dapat operasi komersial 31 Desember

2015. Kedua proyek pembangkit listrik yang dikunjungi Jarman ini merupakan proyek vital dalam mendukung sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera. Menurut Jarman, jika transmisi dapat masuk tepat waktu, kedua pembangkit di Cilacap, yaitu Adipala 600 MW dan PLTU Cilacap IPP Ekspansi 660 MW akan masuk akhir tahun 2015.



Dalam sidak tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengingatkan PT PLN (Persero) untuk dapat menyelesaikan pembangunan jaringan transmisi di Cilacap tepat waktu.

Dalam kunjungan tersebut, Jarman menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di Indonesia. Kunjungan kerja ini akan terus dilakukan untuk mencari

dan mengurai permasalahan di setiap pembangkit listrik sehingga pembangunan proyek-proyek yang terhambat dapat selesai tepat waktu.

PENULIS : PANDU SATRIA JATI



PLTU Cilacap yang dikelola oleh PT. Sumber Segara Primadaya (S2P) berkapasitas 300 MW. PLTU ini juga tengah membangun PLT Ekspansi 600 MW yang direncanakan dapat masuk ke sistem kelistrikan tahun 2016.

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI MODAL PERENCANAAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PENGEMBANG ENERGI TERBARUKAN



1. Pendahuluan

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomer 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Melihat pada kondisional semacam ini maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kepermukaan. Penulis menganggap bahwa pengambilan judul diatas cukup strategis.

Pertama, sebab sebenarnya konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Seiring perjalanan waktu, di satu sisi sektor industri atau korporasi-korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kedua, adalah sebagai upaya untuk menegaskan hubungan perusahaan dengan aktifitas perniagaan yang diselenggarakan oleh para perusahaan. Dalam konteks perniagaan yang diselenggarakan terdapat hubungan timbal-balik antara personal perusahaan secara internal dan antara internal perusahaan dengan masyarakat

luar perusahaan. Corporate Social Responsibility adalah suatu bagian hubungan perniagaan yang melibatkan perusahaan di satu pihak dan masyarakat sebagai lingkungan sosial perusahaan di pihak yang lain. Ketiga, CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat domisili. Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja atau operasionalnya.

Di tahun 1970-an, topik CSR mengemuka melalui tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggungjawab sosial dari kegiatan bisnis. Bahkan Estes menilai bahwa roh atau semangatnya telah ada sejak mula berdirinya perusahaan-perusahaan (di Inggris), yang tugas utamanya adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sikap dan pendapat pro-kontra selalu merupakan bagian



dari sejarah kehidupan perusahaan dan perkembangan konsep CSR itu sendiri. Pro dan kontra terhadap perkembangan CSR terus bergulir. Salah satunya, apakah tanggungjawab sosial tersebut sifatnya wajib atau sukarela, dimana ketika kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) diwajibkan dalam Undang-Undang. Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU. PT), sehingga menuai banyak protes. Pasalnya aktivitas CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukannya "paksaan".

Memang bibit-bibit CSR berawal dari semangat filantropis perusahaan. Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan CSR menjadi semacam social license to operation, dan ini dilakukan oleh komunitas, bukan oleh negara. Kritik lainnya, dalam pelaksanaannya CSR masih memiliki kekurangan. Program-program CSR yang banyak dijalankan oleh perusahaan banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas. Program-program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahaan masih menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Di samping itu, aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang.

Kritik lain dari pelaksanaan CSR adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahaan besar yang ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumberdaya yang ada dengan kekuatan sumberdaya yang dimilikinya, perusahaan-

perusahaan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan CSR, padahal yang dilakukannya hanya semata-mata hanya aktivitas filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum.

Diidentikkannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa implikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum, maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukannya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, ataupun publik menarik perhatian, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perubahan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima.

Seberapa penting CSR bagi perusahaan tetap menjadi wacana dalam praktis bisnis, pro dan kontra ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena perbenturan kepentingan antara pencapaian profit dengan pencapaian tujuan sosial. Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara pikir, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang dikenal sebagai vigilante consumerism yang kemudian berkembang menjadi ethonical consumerism.

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan

merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Hubungan ideal antara bisnis dengan masyarakat menjadi suatu masalah perdebatan (a matter of debate). Pendukung konsep tanggung jawab sosial (social responsibility) memberi argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat selain mencari keuntungan. Ada beberapa definisi tentang CSR, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (Social Responsibility) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan segi kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility--CSR).

Secara etika bisnis, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham atau shareholder, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat disekitarnya. Karena itu CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan atas panggilan nurani pemilik atau pimpinan perusahaan





bagi peningkatan kesejahteraan stakeholder perusahaan. Stakeholders adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. Stakeholders perusahaan meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau supplier), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat.

Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide menunjukan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pembangunan. Sekitar 66% responden juga menunjukan mereka siap berganti merk kepada merek perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan "minat" konsumen dari produk menuju korporat. Konsumen menaruh perhatiannya terhadap tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggungjawab sosialnya. Kepedulian konsumen telah meluas dari sekedar kepada korporatnya. Konsumen semacam ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi sesaat saja. Tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang.

Hubungan antara komunitas dan perusahaan telah mengalami pergeseran. Awalnya perusahaan meluncurkan program Community

Development (CD) dalam upayanya membina hubungan dengan komunitas. Kemudian dengan aktivitas CSR sebagai lisensi sosial untuk beroperasi. Terakhir, perusahaan dituntut untuk mempunyai peranan kepemimpinan dalam komunitasnya. Namur, ternyata hanya sekedar menjalankan aktivitas CSR tidaklah lagi mencukupi. Sekali lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR tetap penting dan harus dijalankan. Namun disamping CSR, perusahaan perlu mengambil insentif kepemimpinan sosial. Inilah yang diistilahkan oleh Hills dan Gibbon dengan Corporate Social Leadership (CSL).

Konteks CSL menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya dituntut untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada gilirannya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karena perusahaan harus memerlukan komunitasnya sebagai mitra, program-program yang dilaksanakan harus mampu benar-benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang. Dunia industri sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan lingkungan, karena "kerakusannya" dalam mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi industri pula yang menjadikan peradaban manusia maju dengan pesat. Tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industri menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Masalahnya adalah bagaimana mengolah jalan simpang diantara dua kepentingan :

kepentingan industri dan kelestarian lingkungan.

Tekanan dari stakeholders yang tumbuh dari kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, telah merasuk ke dalam dunia korporasi dan praktik-raktik manajemen, misalnya institusionalisasi yang dituangkan dalam ISO 14000. Demikian juga konsep produksi telah mengalami kemajuan dari konsep cradle to grave menjadi daur ulang. Cradle to cradle seperti yang diterapkan oleh Xerox. Berarti industri tidak hanya mengamankan agar sampah atau limbah tidak mencemari lingkungan, tetapi juga berusaha agar sampah atau limbahnya dapat didaur ulang. Menjadi "hijau" bukan hanya mengubah proses dan produk, yang hanya berkuat diproses internal pabrik belaka. Tetapi juga memperdulikan ke "hijauan"-nya mulai dari bahan baku yang digunakan dan kualitas perusahaan pemasok dipandang dari kacamata sadar lingkungan, seperti yang tertuang dalam standarisasi ISO 14000.

Perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap aktivitas-aktivitas untuk meminimalkan dampak negative dari sisa produk yang dihasilkan, penanganan limbah maupun "sampah" dari produk yang sudah terpakai, seperti kemasan, namun kesemuanya hanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien bila didukung sistem manajemen yang baik, serta dilandasi oleh budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, dimana hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahaan-perusahaan besar. Karena itu salah satu cara untuk menyebarkan ide-ide "hijau" adalah dengan mendorong perusahaan-perusahaan besar agar memaksa para pemasoknya atau sub kontraknya untuk lebih ramah terhadap lingkungan.

Tekanan masyarakat agar perusahaan lebih peduli kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif.





Konsumen yang semakin sadar terhadap isu lingkungan akan mencari produk yang bersahabat dengan lingkungan. Sebagai dampak ikutannya perusahaan akan mencari pemasok yang bisa memecahkan persoalan-persoalan lingkungan. Hubungan antar perusahaanpun akan berubah, karena sama-sama ditekan untuk menjadi hijau. Maka banyak perusahaan, terutama perusahaan besar, mulai cerewet terhadap perusahaan-perusahaan pemasoknya. Bagi perusahaan-perusahaan besar reputasi adalah aset terpenting perusahaan. Walaupun hanya belakangan ini istilah CSR dikenal, sesungguhnya aktivitas community outreach atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh perusahaan sejak dahulu kala. Bentuk community outreach yang paling primitif adalah corporate philanthropy. Yang terakhir ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan, atau seseorang, untuk memberikan dana kepada individu atau kelompok masyarakat, misalnya dalam bentuk beasiswa. Seiring waktu berlalu, Corporate philanthropy (CP) kemudian berkembang menjadi Corporate Social Responsibility (CSR). CSR berbeda dengan philanthropy dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Yang jelas, melalui CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan pihak pertama (beneficiaries) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Aktivitas sosial yang dilakukan melalui CSR pun jauh lebih beragam. CP maupun CSR biasanya dilakukan oleh para miliyoner ataupun perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu. Banyak kegunaan dari usaha menengah dan kecil untuk melakukan CP dan CSR. Namun dalam praktiknya, CP maupun CSR sering dilakukan sebagai salah satu bagian

dari promosi produk, atau yang sering disebut sebagai social-marketing.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR. Pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku serta menjalankan praktek-praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri dibelakang perusahaan, membela tempat industri mereka bekerja.

Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung akan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memanfaatkannya. Karena perusahaan dianggap konsisten dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memanfaatkannya sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.

Ketiga, keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa

lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitasnya.

Keempat, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan memperlancar hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lancarnya berbagai aktivitas secara kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalankan hubungan dengan perusahaan.

Kelima, meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset Search Worldwide, konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggungjawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

Dan keenam, insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khususnya lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggungjawab sosialnya.

3. Alasan-Alasan Perusahaan Melaksanakan CSR

Setidaknya ada tiga alasan penting dan manfaat yang diperoleh suatu perusahaan dalam merespon dan menerapkan isu tanggung jawab sosial (CSR) yang sejalan dengan operasi usahanya.

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan juga turut memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan adanya penerapan CSR, maka perusahaan secara tidak langsung telah menjalin hubungan dan ikatan emosional yang baik terhadap shareholder maupun stakeholders.





Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme (saling mengisi dan menguntungkan). Bagi perusahaan, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya *licence to operate*, adalah suatu keharusan bagi perusahaan jika dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa mendongkrak citra dan performa perusahaan.

Dan Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi berbagi potensi mobilisasi massa (penduduk) untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akses eksklusifisme dan monopoli sumber daya alam yang dieksploitasi oleh perusahaan tanpa mengedepankan adanya perluasan kesempatan bagi terciptanya kesejahteraan dan pengembangan sumber daya manusia yang berdomisili di sekitar wilayah operasi perusahaan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Suatu perusahaan, jangan pernah mengidap penyakit amputasi sosial, yakni kelompok rasa untuk menolong ketika menyaksikan warga tidak mampu (miskin) disekitarnya. Sebab, hal ini dapat mengundang bertubarannya konflik horizontal sehingga perusahaan akan merasa dirugikan oleh sikap dan perilaku merusak warga.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak – *for better or worse*, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham. Melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Stakeholders dapat mencakup

karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai *stakeholders* dalam skala prioritasnya.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

4. Efektifitas Konsep CSR

Dalam Menangani Permasalahan-Permasalahan Sosial dan Lingkungan Di dalam keterbatasan sumber daya maupun pendanaan, mencari solusi terhadap penyakit, masalah dan penyediaan kebutuhan masyarakat, seringkali mengalami kebuntuan. Contoh penyakit sosial antara lain seperti tindakan korupsi yang sudah dianggap hal yang biasa. Sedangkan masalah masyarakat antara lain misalnya kesenjangan ekonomi yang cenderung semakin melebar, mewabahnya penyakit seperti flu burung, demam berdarah yang tak kunjung tuntas, banjir bandang yang

hampir secara rutin dialami beberapa daerah tertentu, dan sebagainya. Meskipun tanggung jawab utama dalam mengatasi hal tersebut berada pada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, namun sesuai dengan porsinya hal ini juga merupakan tanggung jawab semua pihak sebagai anggota masyarakat. Kita tahu Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan APBN/ APBD, namun upaya yang paling penting dilakukan oleh Pemerintah adalah memetakan penyakit dan masalah masyarakat itu secara komprehensif berikut solusi mengatasinya. Beberapa proyek strategis yang tanggung jawab utamanya berada pada Pemerintah, tentu dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD, selebihnya kita bisa melibatkan dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk secara bersama-sama mengatasi secara tuntas penyakit dan masalah masyarakat tersebut.

Dari sisi dunia usaha, kecenderungan belakangan ini, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak lagi dipandang sebagai *cost center* tetapi sudah menjadi bagian dari strategi usaha dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang stabil. CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang biasanya mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, mengemplant pajak, menindas buruh, dan sejenisnya. Intinya, keberadaan perusahaan berdiri secara berseberangan dengan kenyataan kehidupan sosial. Namun, kini situasi semakin berubah, konsep dan praktik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai suatu strategi perusahaan yang dapat memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha secara jangka panjang. Sebagai contoh Perusahaan meluncurkan program CSR tentang sosialisasi air bersih. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mendambakan kehidupan bersih jauh dari penyakit. Di sisi Perusahaan program ini akan meningkatkan penjualan produk





kebersihannya.

Jelas dalam hal ini Pemerintah Daerah memerlukan dukungan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya dalam mengatasi penyakit dan masalah masyarakat tersebut. Dunia usaha juga sudah menempatkan CSR sebagai strategi usaha dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang stabil. Namun, yang menjadi persoalan adalah upaya yang sudah dilakukan oleh suatu perusahaan bisa jadi tumpang tindih dengan perusahaan yang lain atau bisa juga hanya terfokus pada masalah tertentu saja. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan LSM seyogyanya melakukan upaya bersama dalam mengatasi penyakit dan masalah sosial tersebut. Harapan kita tidak lain tuntasnya penanggulangan penyakit dan masalah sosial yang ada, sekaligus terjadi sinergi yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat pada umumnya.

5. Parameter Keberhasilan Pelaksanaan CSR

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral akhirnya menyatakan apa saja aspek yang akan menjadi fokus penilaian, yaitu pendapatan negara, jumlah produksi, dampak terhadap lingkungan dan dana pengembangan masyarakat (Koran Tempo 22/3). Empat aspek tersebut konsisten dengan pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang terkenal dengan sebutan triple bottom line.

Hanya saja, ada dua ganjalan dalam hal pengembangan masyarakat. Pertama adalah bahwa sudah seharusnya seluruh program sosial dinilai, bukan saja yang berkenaan dengan pengembangan masyarakat. Ini demi keadilan penilaian terhadap yang telah mencurahkan sumberdayanya. Kedua, kalau memang hanya program pengembangan masyarakat yang menjadi fokus, sudah seharusnya bukan semata-mata masalah dana

saja yang dinilai.

Aspek sosial, sebagaimana aspek lingkungan, tidaklah mungkin direduksi menjadi ukuran-ukuran finansial. Pembiayaan merupakan fungsi dari program, dan karenanya ukuran finansial seharusnya menjadi salah satu indikator saja. Secara umum, program sosial perusahaan biasa dinilai dari masukan, proses dan kinerjanya. Kalau hal ini diikuti, maka banyak indikator lain yang bisa dipergunakan untuk menilai program pengembangan masyarakat.

Pertama-tama, harus disadari bahwa program pengembangan masyarakat yang memadai haruslah diintegrasikan ke dalam strategi menyeluruh perusahaan, bukan sekedar tempelan. Untuk menilainya, beberapa indikator dapat dipergunakan, yaitu: Adanya kebijakan tertulis perusahaan mengenai pentingnya membangun hubungan baik dengan masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan. Terdapatnya bagian khusus yang menanganinya pengembangan masyarakat yang bekerja secara efektif dengan bagian lain yang terkait dengan aktivitas hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Sumberdaya manusia yang bekerja untuk bagian itu memiliki kapabilitas yang memadai dari segi pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Adanya rencana kerja strategik untuk waktu lima tahun, dilengkapi dengan rincian program setahunan yang telah disepakati bersama-sama pemangku kepentingan serta mekanisme penyesuaian rencana. Dan tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan program yang direncanakan.

Perusahaan pengembang energy terbarukan dalam operasinya pasti mengakibatkan dampak negative sosial dan lingkungan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Pengembangan masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya mengkompensasi dampak tersebut, di luar minimisasi dampak yang wajib juga dilakukan oleh

perusahaan. Tanpa penyelesaian permasalahan dampak negatif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Karenanya perusahaan seharusnya melakukan perhitungan dampak dengan terperinci sebagai dasar dari pengembangan masyarakat. Sebagai konsekuensi penghitungan dampak, besaran program harus dibedakan menurut wilayah dan kelompok dampak.

Semakin besar suatu wilayah atau kelompok masyarakat terkena dampak negative aktivitas perusahaan, semakin besar hak mereka untuk memperoleh program. Dalam hal tersebut, tiga indikator dapat diajukan, yaitu: Penilaian kerusakan yang diderita masyarakat dilakukan secara bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat, dengan disaksikan oleh pihak lain yang netral.

Negosiasi harga kompensasi kerusakan dilakukan dengan cara-cara yang jujur, diterima masyarakat setempat, tanpa paksaan dan tipuan. Dan pembayaran kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, baik dalam arah individu maupun kelompok. Penting disadari bahwa perusahaan bukanlah agen pembangunan masyarakat semata. Perusahaan adalah entitas yang mencari keuntungan ekonomi, namun dalam usahanya tidak diperkenankan merusak lingkungan dan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Perusahaan juga harus melindungi lingkungan dan sedapat mungkin memaksimalkan keuntungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Karenanya, partisipasi masyarakat luas serta pihak-pihak lain yang kompeten dan memiliki niat baik menjadi sangat penting.

Mengingat hal di atas, berbagai indikator partisipasi dapat dipergunakan, yaitu Program direncanakan secara partisipatoris dengan memperhitungkan keragaman kelompok-kelompok masyarakat; Program tersebut





merupakan komplemen dan suplemen dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain.

Kegiatan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan pihak lain yang memiliki kompetensi yang tepat. Pelaksanaan pemantauan kegiatan dilakukan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Serta dilakukannya evaluasi keberhasilan kegiatan bersama masyarakat dengan umpan balik bagi kegiatan mendatang. Seluruh indikator di atas merupakan indikator masukan dan proses, sementara penilaian kinerja merupakan puncak upaya untuk mengetahui apakah perusahaan diterima oleh seluruh pemangku kepentingannya. Dalam hal ini, haruslah dikemukakan dimensi-dimensi keberhasilan dari berbagai sudut pandang, utamanya dari perusahaan sendiri, masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain yang terlibat langsung dalam pengelolaannya.

Program yang memuaskan seluruh pihak merupakan cerminan keberhasilan tertinggi sehingga dapat diyakini bahwa keberadaan dan operasi perusahaan tersebut akan terus mendapatkan dukungan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

1. Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*
2. Dikutip dari Prof. Drs. B. Tamam Achda, anggota komisi VII DPR-RI, *Konteks Sosiologis Perkembangan CSR dan Implementasinya*.
3. Dikutip dari Jean H. Marten, *Corporate Social Responsibility Perusahaan Multinasional Kepada Masyarakat Sekitar : Studi Kasus, Jurnal Usahawan Nomer 03 Tahun XXXVI Maret 2007, Bagian CSR, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga*.
4. Dikutip dari A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group, 2007*.
5. Dikutip dari Ari Margiono, *Menuju Corporate social Leadership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006*.
6. Dikutip dari Ari Margiono, *Menuju Corporate Sosial Ledership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006*.
7. Dikutip dari Ari Margiono, *Menuju Corporate Sosial Ledership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006*.
8. Dikutip dari AB Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach, CSR, The Jakarta*

Consulting Group, 2007, Jakarta.

9. Dikutip dari A.B. Susanto, 1997, *Budaya Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, 1997, Jakarta*.
10. Dikutip dari A.B. Susanto, 1997, *Budaya Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, 1997, Jakarta*.
11. Dikutip dari A.B. Susanto, 1997, *Budaya Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, 1997, Jakarta*.
12. Dikutip dari Ari Margiono, *Menuju Corporate social Leadership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006*.
13. Dikutip dari Ari Margiono, *Menuju Corporate social Leadership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006*.
14. Dikutip dari Ari Margiono, *Menuju Corporate social Leadership, Suara Pembaharuan, 11 Mei 2006*.

Daftar Pustaka

- AB Susanto, 2007. *A Strategic Management Approach. CSR. The Jakarta Consulting Group. Jakarta*
- AB Susanto, 1997. *Budaya Perusahaan. Jakarta. PT Elex Media Komputindo*.
- AB Susanto, 2007. *Corporate Social Responsibility. The Jakarta Consulting Group. Jakarta*
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Thompson. London*.
- Margiono, Ari. *Menuju Corporate Sosial Ledership. Suara Pembaharuan. 11 Mei 2006*.
- Marten H. Jean, dkk. *Corporate Social Responsibility. Perusahaan Multinasional Kepada Masyarakat Sekitar: Studi Kasus. Jurnal Usahawan Nomer 03 Tahun XXXVI Maret 2007. Bagian CSR. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga*.
- Philip Kotler, 2007. *Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New York. Thomas Dunne Books*.



FOCUS-GROUP DISCUSSION KETAHANAN ENERGI DI KAWASAN ASEAN: PROSPEK PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR INDONESIA "Nuclear is Inevitable Option for National Development"

Kasubdit Kerjasama Ketenagalistrikan, Benhur PL Tobing menghadiri FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN (Dit KSEA), Ditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tanggal 17 November 2014 di Rektorat ITB, Bandung. FGD tersebut terselenggara sebagai inisiasi KEMLU untuk melihat lebih dalam tentang potret ketahanan energi di kawasan ASEAN sekaligus kesiapan ketahanan energi Indonesia menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Beberapa diantara peserta yang hadir adalah perwakilan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), BAPETEN, civitas akademika ITB, UnPad dan UnHan.

FGD dibuka oleh oleh Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN KEMLU, Ibu Ina Hagniningtyas Krisnamurthi. Dalam sambutannya, Ina menyampaikan bahwa kerjasama pada dasarnya merupakan tindakan timbal balik yang seharusnya saling menuntungkan, namun secara prinsip bahwa kepentingan nasional harus didahulukan dan diperjuangkan di atas kepentingan regional ASEAN maupun bilateral dengan mitra wicara. Indonesia sudah berkomitmen menjadi salah satu penandatangan Non-proliferation Treaty (NPT) dan menjadi anggota aktif International Atomic Energy Agency (IAEA) sejak tahun 1957.

Sesi pertama dibuka dengan paparan dari Benhur PL. Tobing Kasubdit



Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN (Dit KSEA), Ditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tanggal 17 November 2014.

Kerjasama Ketenagalistrikan dengan judul Kerjasama dan Potret Ketahanan Energi di ASEAN. Benhur menyampaikan bahwa Indonesia sebagai pengguna energi terbesar di ASEAN sekitar 36% dari permintaan secara keseluruhan, mengkonsumsi 66% lebih banyak energi daripada Thailand (pengguna terbesar kedua) dan lebih dari 50 kali lebih banyak energi daripada Brunei Darussalam (yang memiliki konsumsi terendah). Indikator penting lainnya, akses listrik, juga bervariasi dari yang aksesnya dekat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Singapura hingga yang aksesnya di bawah 50% seperti di Kamboja dan Myanmar. Seperti di sebagian besar wilayah dunia, bauran energi primer di Asia Tenggara didominasi oleh bahan bakar fosil, minyak, gas alam dan batu bara sekitar lebih dari tiga-perempat dari permintaan. Dari dekade terakhir, telah ada pergeseran yang berlangsung terhadap batubara dan gas alam, terutama di biaya minyak untuk pembangkit listrik dan industri, dan biomassa tradisional di sektor

perumahan. Namun minyak tetap menjadi bahan bakar dominan, dengan permintaan saat ini di 4,4 juta barel per hari (MB/d), dan sekitar 37% dalam bauran energi primer. Gas alam kedua di 21% dari bauran energi primer dengan permintaan sekitar 141 miliar kubik meter (Bcm) (yang sebanding dengan permintaan gas saat ini di Cina). Diperkirakan sekitar 134 juta orang di Asia Tenggara, atau 22% dari populasi ASEAN, saat ini tidak memiliki akses listrik dan sekitar 280 juta orang bergantung pada penggunaan biomassa tradisional untuk memasak, hampir setengah dari populasi wilayah. Akses ke layanan energi yang terjangkau dan dapat diandalkan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kurangnya akses terhadap energi ini sering terkait dengan kurangnya penyediaan air bersih, sanitasi dan kesehatan. Akses tersebut dengan pengecualian Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Singapura (yang telah mencapai tingkat

akses yang tinggi). Indonesia menyumbang hampir setengah dari populasi yang tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses listrik, sebagian mencerminkan kesulitan dalam penyediaan akses.

Nara sumber kedua adalah Ibu Farida Zed, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN. Farida memaparkan tentang Ketahanan Energi dan Kebijakan Energi Nuklir di Indonesia yang dalam paparannya ia menyampaikan tentang peningkatan kebutuhan energi dunia atas liquid fuels, coal dan natural gas yang semakin meningkat. Meskipun kebutuhan akan energi terbarukan juga meningkat namun masih jauh di bawah ketiga sumber energi tersebut sebelumnya. Yang menarik adalah bahwa kebutuhan akan energi nuklir juga meningkat tipis sekitar 2% hingga tahun proyeksi 2040. Farida melanjutkan bahwa kondisi energi nasional masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk bauran energi Indonesia, dimana minyak (49,7%); batubara (24,5%); gas (20,1%); EBT (5,7%). Indonesia menjadi net oil importer: produksi (328 juta barel); konsumsi (453 juta barel); impor BBM (131 juta barel); impor crude (88 juta barel); kapasitas kilang $\pm$ 1 juta barel per hari. Konsumsi energi per kapita masih rendah (5,4 BOE/cap); Konsumsi listrik (752 kWh/cap); Rasio elektrifikasi nasional: + 80,1%; Kapasitas pembangkit: + 47,8 GW. Subsidi Energi: $\pm$ Rp 299 T. Kebijakan energi nasional disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, dicapai dengan mewujudkan (i) sumber daya energi sebagai modal pembangunan nasional; (ii) kemandirian pengelolaan energi; (iii) terjaminnya ketersediaan

energi dalam negeri; (iv) pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan; (v) pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor; (vi) akses masyarakat terhadap energi secara adil dan merata; (vii) pengembangan kemampuan dan kemandirian teknologi, industri dan jasa energi dalam negeri dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia; (viii) terciptanya lapangan kerja; dan (ix) terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara prinsip kebijakan nasional terkait energi bahwa energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Nara sumber selanjutnya adalah Bpk. Sutarnan dari BATAN yang memaparkan Modalitas dan Kapabilitas Indonesia Dalam Pengembangan Energi Nuklir. Sutarnan menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dari 10 negara dengan jumlah penduduk terbesar yang belum memiliki PLTN selain Nigeria dan Bangladesh. Bahkan setelah

bencana yang menimpa PLTN Daiichi di Fukushima, Jepang, sejumlah negara bahkan tetap meneruskan konstruksi pembangunan PLTN untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonominya, diketahui dua negara di ASEAN sudah menunjukkan minat serius membangun PLTN. Program pembangunan PLTN membutuhkan waktu sekitar 15 tahun, sehingga bila dipandang perlu harus direncanakan dan dibangun dari saat ini. Secara infrastruktur PLTN, Indonesia sudah memadai dari berbagai kriteria kesiapan, namun political will dan public awareness masih menjadi kendala dan tantangan utama. BATAN terus melakukan studi atas sejumlah lokasi yang memungkinkan menjadi lokasi pembangunan PLTN. Dari sudut pandang BATAN dan akses keterbukaan informasi publik, Sutarnan menyampaikan kata kunci, bahwa untuk akses Safety (Keselamatan) dapat dibuka selebar-lebarnya, dan akses untuk Security (Keamanan) harus ditutup serapat-rapatnya.

Nara sumber ke-empat adalah Prof. DR. Eng. Zaki Su'ud, Guru Besar ITB yang menyampaikan Pengembangan Energi Nuklir di Indonesia dari Aspek Keamanan dan Penerimaan Masyarakat. Profesor Zaki menggambarkan tentang evolusi teknologi PLTN yang



Hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut, Kasubdit Kerjasama Ketenagalistrikan, Benhur PL Tobing



semakin responsif dan menerapkan standard safety dan security yang jauh lebih tinggi bahkan dari teknologi aviation. Indonesia dapat menggunakan teknologi PLTN generasi ke-3 Advanced LWRs yang bisa mengantisipasi bencana setara bencana di Fukushima Jepang. Bahkan di PLTN Generasi ke3+ dan Generasi -4 span fuel yang masih memiliki 80% energi nuklir yang belum digunakan, dapat digunakan hingga 50%nya. Profesor Zaki juga menambahkan bahwa kejadian PLTN Daiichi di Fukushima merupakan kejadian luar biasa yang melampaui derajat keamanan nuklir, di mana terjadi Gempa Bumi dengan intensitas 9 Skala Richter, suatu skala yang kemungkinan terjadi sekali dalam ribuan tahun. Selain itu, desain PLTN tersebut masih PLTN Generasi ke-2 dan belum mengadopsi Generasi ke-3 ataupun ke-3+. Seandainya PLTN tersebut telah mengadopsi minimal PLTN Generasi ke-3, maka bencana setara Gempa Bumi tersebut dapat ditoleransi.

Dari diskusi yang timbul di dalam FGD, dicapai kesimpulan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi nuklir untuk ketenagalistrikan (PLTN) merupakan inevitable fact, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan energi, situasi energi nasional, regional dan dunia, sehingga menjadi penting untuk meyakinkan para stakeholder dan masyarakat bahwa nuklir sebagai tantangan untuk diwujudkan. Untuk itu, perlunya strategi yang menukik dan fokus kepada targetted audiens. Dalam kerangka ASEAN, kerjasama yang dapat dibajngun adalah pembentukan Regional Center for Public Awareness. Menutup berita ini, penulis mengutip lelucon absurd yang disampaikan oleh moderator, sebagai berikut:

Pada suatu petang jelang



Kasubdit Kerjasama Ketenagalistrikan, Benhur PL Tobing memaparkan presentasi dengan judul Kerjasama dan Potret Ketahanan Energi di ASEAN.

malam hari, seorang Supir Taksi mengantarkan seorang Gadis belia dari sebuah pusat perbelanjaan ke arah kompleks perumahan elit. Perjalanan sudah berlangsung dua jam namun belum sampai di tujuan karena kemacetan jam bubar kantor. Di tengah perjalanan, rupanya sang Gadis melihat Argometer Taksi sudah menunjukkan angka 150ribu-an, sementara uang di dompet rupanya juga sisa segitu. Dengan panik Si Gadis menepuk pundak Pak Supir dan meminta menepi walaupun belum sampai tujuan. Begitu ditepuk pundaknya, Sang Supir bukannya berhenti malahan panik tancap gas dan menabrak beberapa mobil lain di depannya, bahkan baru berhenti setelah mobilnya menabrak tiang lampu jalan.

Setelah Pak Polisi tiba di lokasi, Pak Polisi menanyai Si Gadis:

Polisi : "coba ceritakan Dek, apa yang terjadi?"

Gadis : "entahlah Pak, saya hanya menepuk pundaknya dan meminta menepi karena uang saya tidak cukup lagi membayar kalau sampai tujuan"

Polisi : "owh begitu"

Lalu Pak Polisi menanyai Pak Supir.

Polisi : "mengapa Bapak sampai menabrak mobil lain dan tiang lampu jalan, bahkan Bapak sudah membahayakan pengemudi

dan penumpang Bapak sendiri, kenapa seperti itu Pak"

Supir : "sebelum jadi Supir Taksi, selama sepuluh tahun tidak pernah ada yang menepuk pundak saya, Pak"

Polisi : (heran) "mengapa begitu?"

Supir : "sepuluh tahun saya nyetirnya mobil jenazah, Pak"

Moral of the story-nya:

Janganlah berprasangka buruk atas keadaan di sekitar kita hanya karena ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Janganlah kita berburuk sangka terhadap tenaga nuklir, sementara sebagian dari kehidupan kita sudah memanfaatkan nuklir, misalnya untuk kedokteran nuklir dan pertanian nuklir, di mana keduanya untuk tujuan damai, seperti halnya untuk tujuan pembangkitan tenaga listrik. Terkait pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan tenaga listrik tidak bisa secara parsial melihat bencana reaktor nuklir yang pernah saja, lihat juga betapa semua negara maju memiliki backbone energinya dari nuklir; sementara bencana energi lain (hydro dam-failure, LPG, Oil, Coal-mine) juga tercatat menimbulkan korban jauh lebih banyak daripada korban jiwa oleh PLTN.



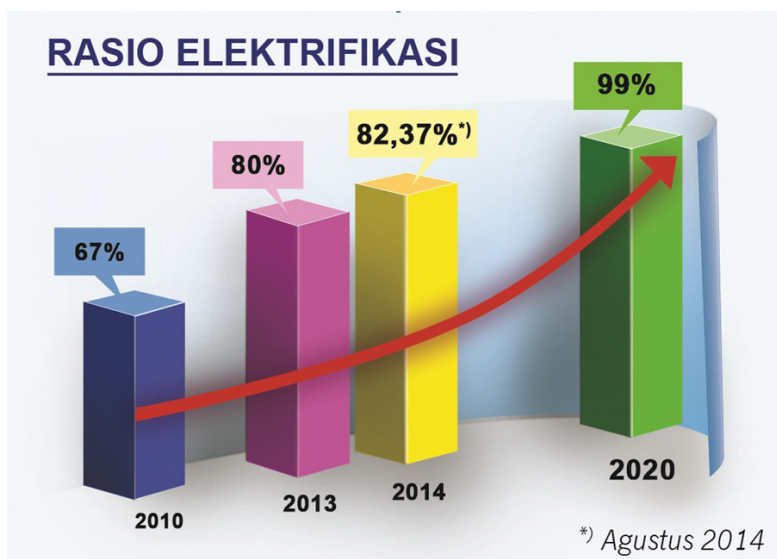
KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI LISTRIK TAHUN 2015

Adanya penyesuaian tarif yang telah berlangsung dari tahun 2013 memberikan dampak positif terhadap sektor ketenagalistrikan secara umum dengan adanya penghematan subsidi listrik yang dapat dialihkan untuk peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk pelayanan tenaga listrik yang lebih baik tiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan rasio elektrifikasi yang signifikan. Rasio elektrifikasi merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat aksesibilitas listrik. Rasio elektrifikasi yang pada tahun 2010 hanya sebesar 67% berhasil ditingkatkan menjadi 80% pada tahun 2013, dan saat ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 82,37% (Agustus 2014). Ada peningkatan yang signifikan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada 17,63% dari penduduk Indonesia belum menikmati listrik atau setara dengan sekitar 44,5 juta penduduk.

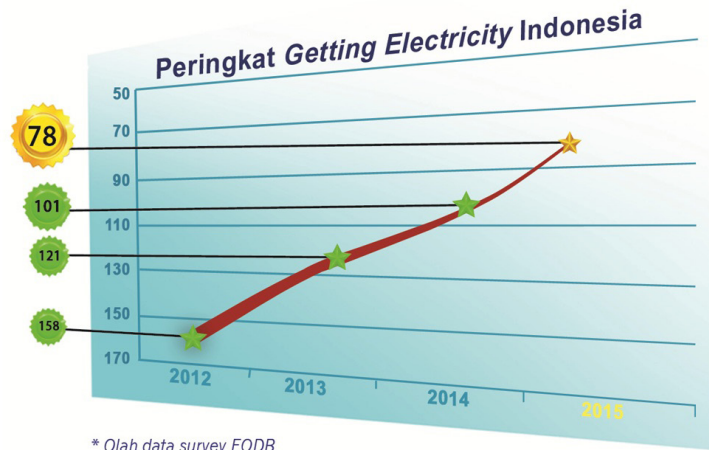
Adanya penyesuaian tarif yang telah berlangsung dari tahun 2013 memberikan dampak positif terhadap sektor ketenagalistrikan secara umum dengan adanya penghematan subsidi listrik yang dapat dialihkan untuk peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk pelayanan tenaga listrik yang lebih baik tiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan rasio elektrifikasi yang signifikan. Rasio elektrifikasi merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat aksesibilitas listrik. Rasio elektrifikasi yang pada tahun 2010 hanya sebesar 67% berhasil ditingkatkan menjadi 80% pada tahun 2013, dan saat ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 82,37% (Agustus 2014). Ada peningkatan yang signifikan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada 17,63%

dari penduduk Indonesia belum menikmati listrik atau setara dengan sekitar 44,5 juta penduduk.

Pada tahun 2014, Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait tarif dan subsidi listrik bahwa terhadap 4 (empat) golongan pelanggan tarif yang akhir tahun 2013 telah mencapai keekonomiannya (non subsidi), yaitu (1) Rumah Tangga Besar, R-3/TR daya 6.600VA keatas, (2) Bisnis Menengah, Bisnis B-2/TR, daya 6.600VA s.d 200kVA, (3) Bisnis Besar, B-3/TM daya diatas 200kVA, dan (4) Kantor Pemerintah Sedang, P-1/TR daya 6.600VA s.d 200kVA, diterapkan mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) sejak 1 Mei 2014. Selain itu Pemerintah menghapus subsidi listrik untuk 7 (tujuh) golongan pelanggan yang dianggap kelompok mampu dan tidak layak disubsidi, melalui penyesuaian tarif listrik secara bertahap menuju tarif keekonomian (non subsidi), yaitu : (1) Rumah Tangga R-1/TR daya 1.300 VA, (2) Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200VA, (3) Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500VA s.d 5.500VA, (4) Industri Menengah I-3/TM daya diatas 200kVA, (5) Industri Besar I-4/TT daya diatas 30.000kVA, (6) Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200kVA, (7) Penerangan Jalan Umum P-3/TR, sehingga sejak akhir tahun 2014 (per 1 November 2014), tarif pelanggan tersebut sudah disesuaikan mencapai nilai keekonomiannya. Sama halnya dengan empat golongan pelanggan tarif non subsidi yang sudah diterapkan mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment), maka



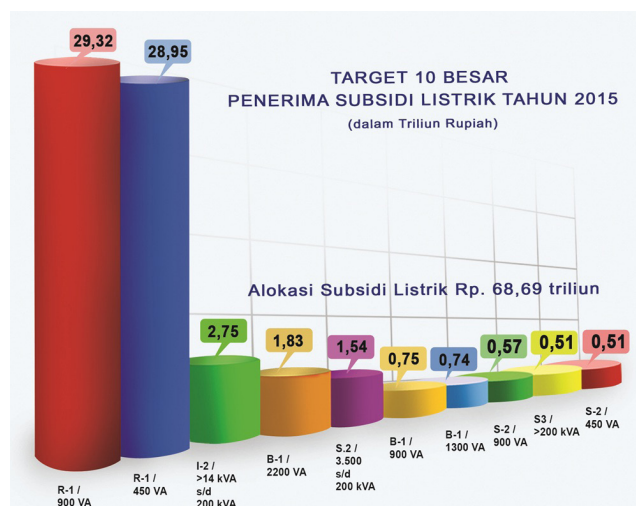
900VA.



terhadap golongan pelanggan yang dihapus subsidiya tahun 2014 ini pun diterapkan perlakuan sama. Selain itu juga pelanggan Layanan Khusus TT/TM/TR yang memang tidak disubsidi pun diterapkan mekanisme yang sama. Dengan demikian akan terdapat 12 (dua belas) golongan pelanggan tarif non subsidi yang terhadapnya diterapkan mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment). Besaran penyesuaian dihitung berdasarkan tiga indikator ekonomi makro yang sifatnya di luar kendali PT PLN (Persero) yaitu perubahan inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), nilai kurs yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), dan harga minyak Indonesia (ICP) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Dengan adanya perubahan ketiga indikator ekonomi makro tersebut, yang menyebabkan perubahan besaran biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP), maka terhadap 12 golongan pelanggan tersebut juga mengalami penyesuaian tarif (tariff adjustment) yang sebanding dengan besaran perubahan BPP tersebut. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero), yang berlaku mulai 1 Januari 2015. Dengan demikian pada tahun 2015, akan terdapat 12 (dua belas)

pelanggan yang merupakan tarif non subsidi dari total 37 (tiga puluh tujuh) golongan tarif pelanggan PT PLN (Persero). Dengan total seluruh pelanggan yang berjumlah 56,48 juta pelanggan, jumlah pelanggan tarif non subsidi ini ada sebanyak 10,48 juta pelanggan (18,6%). Namun demikian pelanggan ini mengkonsumsi listrik sekitar 65% dari listrik terjual PT PLN (Persero), yaitu sebanyak 106,91 TWh dari total penjualan 162,50 TWh (data per akhir Oktober 2014). Ini artinya jika tidak ada perubahan kebijakan subsidi listrik, ditahun-tahun mendatang, energi listrik yang harus disubsidi oleh Pemerintah masih ada sebanyak 35%, yang didalamnya termasuk pelanggan rumah tangga kecil daya 450VA dan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa Pemerintah menyediakan dana subsidi bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2015 subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp. 68,69 triliun, yang sebagian sebesar (85% setara Rp.58,3 triliun) diperuntukan bagi pelanggan rumah tangga kecil daya 450 VA (Rp. 28,95 triliun untuk 22 juta pelanggan dan daya 900 VA (Rp. 29,32 triliun untuk 20 juta pelanggan) yang belum mengalami penyesuaian tarif tenaga listrik. Demikian juga golongan pelanggan industri kecil, pelanggan sosial, pelanggan bisnis kecil, pelanggan kantor Pemerintah kecil, masih tetap disubsidi. Meskipun masih ada masyarakat yang tarif listriknya disubsidi, diharapkan peran serta dalam pengendalian subsidi listrik dengan pola dan gaya hidup hemat listrik. Pemerintah sendiri terus berupaya menjaga kelangsungan penyediaan tenaga listrik dengan peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, penghematan subsidi listrik, dan terus mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran.



Humas Pemerintah Dituntut Kreatif

Humas pemerintah memiliki peran strategis dalam menyampaikan capaian-capaian pemerintah sekaligus menangkis berita-berita negatif yang kerap diberitakan media massa. Demikian salah satu poin yang disampaikan oleh Lena Satlita, pakar Humas dari Universitas Negeri Yogyakarta dalam Seminar Pranata Humas Masa Depan bertajuk “Menuju Humas Profesional untuk Indonesia Baru”. Seminar ini merupakan salah satu acara dalam rangkaian kegiatan Pra-Kongres Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Yogyakarta, 11 – 12 November 2014.

Dalam kesempatan yang sama, praktisi kehumasan Ermiel Tabrani menyampaikan bahwa esensi dari humas adalah membangun kepercayaan. Ermiel berpendapat bahwa pemerintah memiliki masalah dengan reputasi, dan ini menjadi tantangan bagi humas pemerintah. Menurutnya lagi, humas pemerintah harus berani membuat terobosan dengan menciptakan keakraban dengan pemangku kepentingan, termasuk wartawan. Humas pemerintah diharapkan tidak lagi menciptakan jarak dengan wartawan. Senada dengan pernyataan Ermiel, Henry Subiakto yang merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa juga menyoroti pentingnya inovasi bagi humas pemerintah. Henry menyatakan bahwa humas pemerintah dituntut kreatif, salah satunya dengan mengoptimalkan jejaring sosial sebagai media penghubung untuk layanan informasi pada masyarakat.

Sambutan pembukaan Pra-Kongres Pranata Humas disampaikan



Suasana Pra-Kongres Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Yogyakarta, 11 – 12 November 2014.

oleh Tulus Subardjono, Direktur Komunikasi Publik Kemkominfo. Tulus menyampaikan bahwa Pra-Kongres diselenggarakan sebagai upaya untuk mengembangkan kapasitas dan kreatifitas dalam bidang kehumasan. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat memperkuat jejaring humas lokal maupun regional.

Dalam Pra-Kongres juga dibahas cikal bakal pembentukan wadah untuk pranata humas pemerintah. Peserta Pra-Kongres yang merupakan pranata humas maupun calon pranata humas, juga pembina jabatan pranata humas dari pusat maupun daerah dibagi menjadi tiga komisi yang membahas tata tertib, organisasi, dan program. Hasil dari Pra-Kongres ini akan diwujudkan dalam Kongres Pranata Humas yang dijadwalkan tahun depan.

Selain seminar, Pra-Kongres Pranata Humas juga menghadirkan paralel workshop dengan menetengahkan

empat topik yakni sertifikasi humas, penulisan ilmiah kehumasan, monitoring isu kehumasan, serta penilaian angka kredit. Kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai macam lomba, termasuk lomba penulisan blog, fotografi, musik akustik, juga fashion show. Lomba-lomba difasilitasi oleh panitia penyelenggara untuk menstimulus

TINJAUAN PENATAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA DALAM RKA-K/L

PENULIS : HARI DWI WIJAYANTO

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan agar penganggaran di Indonesia menggunakan cara penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada outcome.

Undang-Undang tersebut juga menjelaskan agar keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.

Dalam prakteknya, penerapan penganggaran berbasis kinerja di berbagai negara cukup bervariasi, namun ada suatu pola yang sama yang merupakan pondasi atau substansi utama dari sistem penganggaran berbasis kinerja tersebut, yaitu:

- Adanya rencana strategis (strategic plan) yang memuat kondisi yang ingin dicapai (berbasis pada outcome) dan strategi pencapaiannya berdasarkan kerangka logika yang jelas, relevan, dan terukur;
- Sistem evaluasi yang kredibel yang mampu mengukur capaian atas pelaksanaan rencana strategis di atas sehingga menghasilkan informasi kinerja yang valid; dan
- Rencana strategis dan informasi kinerja yang valid di atas menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran.

Proses penyusunan Rancangan APBN dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dilakukan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja



yang berorientasi pada hasil (outcome). Upaya konkrit untuk menjalankan sistem penganggaran berbasis kinerja sudah dimulai sejak tahun 2004 yang sampai saat ini sudah banyak kemajuan dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Arsitektur Kinerja Berbasis Outcome dalam RKA-K/L

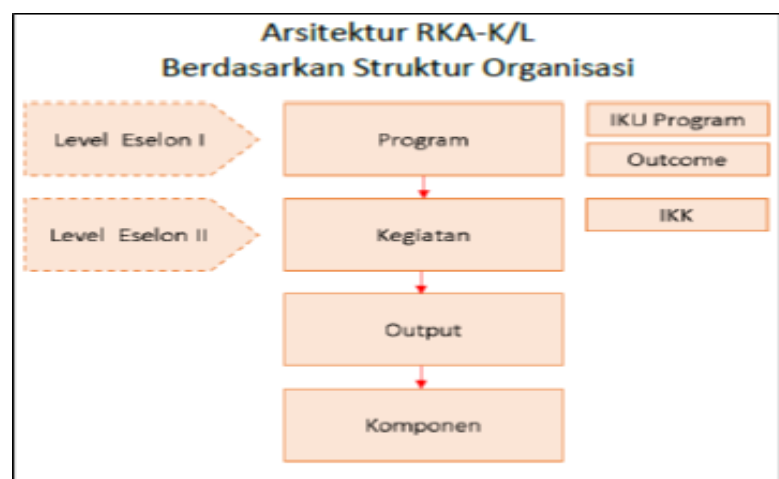
Sebagaimana diketahui bahwa arsitektur kinerja yang diterapkan pada RKA-K/L sejak awal reformasi sistem keuangan pada tahun 2005 terdiri atas komponen dan struktur sebagai berikut:

- Program

- Kegiatan
- Output
- Komponen.

Pada tahun 2009 dan 2010 dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan dimana struktur program dan kegiatan didasarkan pada struktur organisasi. Struktur program dan kegiatan berdasarkan struktur organisasi ini dapat digambarkan dalam gambar 1 di bawah dan diterapkan pada RKA-K/L 2010 – 2015.

Arsitektur kinerja tersebut sangat berhasil mengantarkan transformasi sistem penganggaran yang sebelum reformasi keuangan negara dijalankan murni berdasarkan jenis belanja (input-based) menjadi lebih ke arah performance-based



budgeting dengan basis pada output.

Seiring dengan semangat untuk menerapkan secara penuh performance-based budgeting, diperlukan penguatan rencana strategi sebagaimana disebutkan pada Bab Pendahuluan yang diawali dengan penataan arsitektur kinerja dalam RKA-K/L.

Arsitektur kinerja yang baru tersebut menggunakan pendekatan kerangka logika (logic model) program dengan basis pada outcome yang komponennya terdiri atas:

- Outcome
- Output
- Aktivitas
- Input
- Indikator dan target untuk masing-masing outcome dan output.

Masing-masing komponen membentuk suatu rangkaian yang dapat memperlihatkan hubungan dan keterkaitan logis antara kondisi yang diinginkan oleh suatu program dan strategi dalam mencapai kondisi yang diinginkan tersebut. Secara garis besar, hubungan dan keterkaitan masing-masing komponen tersebut dapat digambarkan sebagaimana terdapat pada gambar 2.

Hubungan logis antar komponen

di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

“Suatu outcome akan dicapai apabila telah tersedia atau diproduksi output yang diperlukan. Untuk menghasilkan suatu output diperlukan serangkaian aktivitas dimana dalam melaksanakan berbagai aktivitas dimaksud diperlukan berbagai sumberdaya (input)”.

Penerapan arsitektur kinerja yang baru tersebut dalam RKA-K/L dijadwalkan mulai diterapkan dalam RKA-K/L 2016.

Alasan Perlunya Perubahan Arsitektur Kinerja

Analisis atas seluruh output dalam RKA-K/L menghasilkan temuan penting sebagai berikut :

1. Jumlah output terlalu banyak.
2. Banyak output bersifat administratif, bukan substantif misalnya laporan dan dokumen.
3. Banyak output yang berkarakteristik input, misalnya kendaraan, komputer, gedung.
4. Target output tidak jelas, baik bagi yang menyusun maupun bagi yang mengevaluasi.
5. Indikator kinerja masih mencerminkan informasi yang bersifat teknis dan terlalu rinci.

Temuan di atas mengindikasikan bahwa ternyata capaian kinerja bagus dimaksud belum sepenuhnya mencerminkan bagusnya kualitas

belanja KL.

Kondisi output di atas juga berpotensi disalahtafsirkan oleh masyarakat bahwa Belanja KL banyak untuk keperluan birokrasi sehingga seolah menjadi justifikasi pemborosan anggaran.

Penyusunan Informasi Kinerja

Penyusunan informasi kinerja dimulai dari penentuan outcome, yaitu keadaan yang ingin dicapai. Selanjutnya, perlu dirumuskan output apa yang harus diproduksi, bagaimanaprosesmemproduksinya, dan terakhir sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan serangkaian proses yang telah ditetapkan. Berikut akan dijelaskan lebih detail mekanisme penyusunan informasi kinerja dimaksud, mulai dari penyusunan outcome sampai dengan penyusunan input.

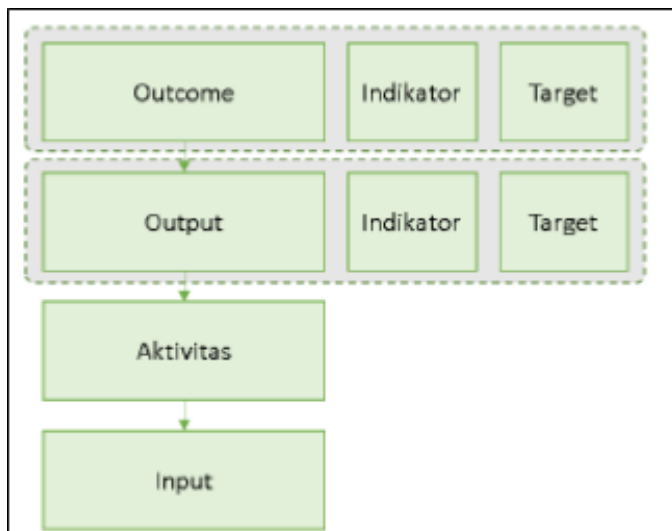
Penjelasan dari gambar 3 yaitu:

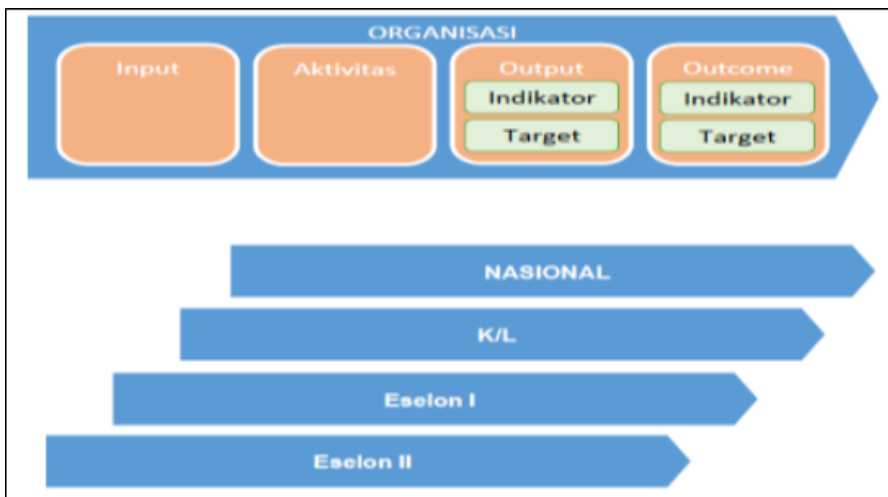
1. Di setiap level organisasi terdapat struktur informasi kinerja yang bersifat baku, yaitu Input-Aktivitas-Output-Outcome,
2. Outcome/output suatu organisasi bisa saja merupakan outcome/output organisasi level di atasnya sekiranya struktur organisasi didasarkan pada system lini produk. Namun, bisa juga outcome/output suatu organisasi akan tercatat sebagai input/aktivitas bagi organisasi dilevel atasnya sekiranya pembagian organisasi didasarkan pada input/proses.
3. Diperoleh kejelasan atas dua hal sekaligus, yaitu hierarki informasi kinerja dari level makro strategis sampai dengan level mikroteknis dan aspek akuntabilitas organisasi di masing-masing level.

Pola berpikir penyempurnaan arsitektur kinerja yaitu:

1. Menentukan fungsi setiap organisasi, karena pada dasarnya setiap organisasi pasti memiliki fungsi.

2. Menyusun rencana strategis berdasarkan konsep logic model yang meliputi:
 - a. Outcome, yaitu keadaan yang





terkait dengan program tersebut. Selain itu diharapkan dikemudian hari dapat lebih tepat dalam pengambilan kebijakan dan juga pandangan antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dapat memiliki persepsi yang sama dalam melihat suatu program.

ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu baik jangka panjang, menengah, dan pendek. Kriteria outcome yang baik antara lain:

- Rumusan outcome harus dalam perspektif eksternal (customer atau target group);
- Rumusan outcome harus spesifik terhadap intervensi yang dilakukan dan tidak terlalu luas/umum.
- Outcome harus terukur dan keterukuran tersebut ditunjukkan oleh indikatornya.
- Rumusan outcome sebaiknya dibuat dalam kalimat positif, misalnya kalimat yang diawali kata seperti “menurunnya” sebaiknya diubah menjadi kata “meningkatnya” dengan tetap mempertahankan substansi.

b. Output, yaitu suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau target group agar outcome dapat terwujud.

Perbedaan utama antara outcome dan output adalah outcome biasanya tidak dapat secara langsung “dibeli” atau diproduksi, sebaliknya output biasanya dapat secara langsung diproduksi.

c. Aktivitas, yaitu berbagai proses yang diperlukan untuk

menghasilkan output. Tahapan perumusan aktivitas merupakan penyusunan proses bisnis mulai dari awal sampai dengan dihasilkannya suatu output atau sampai dengan output tersebut tersampaikan pada customer.

d. Input, yaitu sumber daya atau prasyarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan menyampaikan output. Umumnya input antara lain meliputi:

- sumberdaya manusia;
- peralatan dan mesin;
- tanah dan bangunan;
- data dan informasi; dan
- norma/sistem/prosedur/ ketentuan.

3. Melakukan tahap pengorganisasian yang meliputi:

- a. Menggunakan organisasi yang telah ada
- b. Menyusun organisasi yang benar-benar baru seluruhnya
- c. Kombinasi keduanya.

Kesimpulan

Penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L untuk tahun 2016 ini dilakukan dalam upaya untuk peningkatan kualitas penyusunan anggaran dan dapat dijadikan alat manajerial serta kontrol, baik bagi para penanggungjawab program maupun pihak-pihak lain yang